



KABUPATEN TAPIN

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) MURNI TAHUN 2027

**DINAS
PERHUBUNGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar untuk tahun yang akan datang.

Dokumen Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2027 dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing bidang/ bagian di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang/ bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai. Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan di bidang Perhubungan Kabupaten Banjar menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Martapura, 02 April 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar,



Dr. I. GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671210 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022	10
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar	10
2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan;	34
2.1.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu (Tahun 2022) dan Perkiraan Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023.....	40
2.1.3 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun n-2).....	60
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	60
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar	62
2.4 Hasil Analisa Rencana Kebutuhan.....	68
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	88
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	90
3.1 Telaah Prioritas Nasional	90
3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	90
3.1.2. Telaahan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.....	100
3.1.3 Telaah Terhadap Kebijakan Kabupaten Banjar	108
3.2. Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah	119
3.3. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Prioritas	121
3.3.1. Faktor- Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas	121
3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	122
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	138
BAB V PENUTUP	235

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 Misi, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2

TABEL 2. 1 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN..... 11

TABEL 2. 2 REALISASI KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 23

TABEL 2. 3 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR S/D TAHUN 2023 42

TABEL 2. 4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR 61

TABEL 2. 5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 69

TABEL 2. 6 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 89

TABEL 3. 1 ISU-ISU GLOBAL, NASIONAL DAN LOKAL 90

TABEL 3. 2 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 121

TABEL 3. 3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN
MAJU TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR..... 123

TABEL 4. 1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 139

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2027.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2027 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2025-2029, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis” Renja Dinas Perhubungan Kab. Banjar Tahun 2027. Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2025-2029, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya;

2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan; dan
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Mencermati lima misi pembangunan daerah tersebut, peran Dinas Perhubungan dominan pada misi ke-2 yaitu Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar 2025-2029, seperti tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN Keadilan.
MISI 2 Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
Tujuan 2 Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif.
Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah. Satuan: Indeks Konektivitas
Kode 2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kode 2.15.02 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah Indikator: Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan (Indeks) Kode 2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Sasaran meningkatnya kecelakaan transportasi

perhubungan Indikator: Persentase transportasi perhubungan yang laik jalan (%) 2. Sasaran meningkatnya kelancaran lalu lintas Indikator: V/C Rasio (Indeks) 3. Sasaran meningkatnya kawasan parker tertib Indikator: Persentase Kawasan parker tertib (%) 4. Sasaran meningkatnya trayek angkutan umum Indikator: Persentase izin trayek angkutan umum yang aktif (%) 5. Sasaran meningkatnya kualitas terminal & halte sesuai standar Indikator: Persentase terminal & halte yang sesuai standar (%) Kode 2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran 1. Sasaran meningkatnya pelayanan angkutan Sungai dan danau Indikator: Persentase angkutan Sungai dan danau dengan Tingkat kinerja pelayanan yang baik (%)
Program Prioritas: Banjar Membangun Definisi: Banjar membangun merupakan program prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur daerah dalam rangka mendukung upaya pembangunan secara umum. Intervensi dalam program prioritas ini memfokuskan kepada pembangunan jalan, jembatan dan optimalisasi transportasi publik di Kabupaten Banjar. Rincian Program: Pengembangan angkutan massal yang nyaman dan aman.

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029

Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat antara lain program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Pohon Kinerja hasil pembahasan dengan Kemenpan RB, hasil evaluasi tahun sebelumnya dan rancangan teknokratik RPJMD Kab. Banjar Tahun 2025-2029 serta RPJMD 2025-2029 yang disusun secara simultan.

Agenda Penyusunan Renja PD tahun 2026 adalah sebagaimana dibawah ini :

- 1. Tahapan penyusunan Renja PD meliputi:
 - (1) Persiapan penyusunan;
 - (2) Penyusunan rancangan awal;

- (3) Penyusunan rancangan;
 - (4) Perumusan rancangan akhir;
 - (5) Penetapan.
2. Tahapan Persiapan Penyusunan Renja PD sebagaimana poin 1 angka (1) dilaksanakan pada minggu keempat bulan Desember 2024, meliputi:
- (1) penyusunan rancangan keputusan Kepala SKPD tentang pembentukan tim penyusun Renja PD;
 - (2) orientasi mengenai Renja PD;
 - (3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD;
 - (4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
3. Penyusunan rancangan awal Renja PD sebagaimana dimaksud poin 1 angka (2) dilaksanakan mulai minggu keempat Desember 2025 – Januari 2026, meliputi:
- (1) Rancangan awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.
 - (2) Hasil penyusunan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. penutup.
 - (3) Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
4. Penyusunan Rancangan Renja PD sebagaimana poin 1 angka (3) dilaksanakan mulai 17 Februari 2026, meliputi:
- (1) Penyusunan Rancangan Renja PD adalah proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
 - (2) Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada angka (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam poin 3 angka (2).

- (3) Dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Serta disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.
 - (4) Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang kabupaten paling lambat 3 Maret 2025 untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
 - (5) Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan Renja dimaksud untuk menjamin rancangan Renja PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappedalitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk selanjutnya dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Renja PD oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - (6) Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada angka (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappedalitbang.
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana poin 1 angka (4) merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja, meliputi:
- (1) Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif dengan memperhatikan:
 - a. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Hasil Pembahasan Musrenbang Kecamatan pada saat Forum Perangkat Daerah;
 - c. Hasil Forum Lintas Perangkat Daerah yang membahas dukungan terhadap Proyek Strategis Daerah dan dukungan terhadap *Crosscutting* Perangkat Daerah;
 - d. Usulan Pokok Pikiran (POKIR) DPRD bagi Perangkat Daerah tujuan usulan Pokir;
 - e. Usulan Hibah dan Bansos bagi Perangkat Daerah teknis penyalur hibah dan bansos;
 - f. Belanja wajib lainnya yang diamanahkan Pemerintah Pusat.
 - (2) Rancangan akhir Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud dalam poin 3 angka (2).

6. Penetapan Renja PD sebagaimana poin 1 angka (5) meliputi:

- (1) Rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud dalam poin 5 angka (2), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin 6 angka (1) bertujuan untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, bila ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda Litbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja PD berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas.
- (5) Rancangan akhir Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappedalitbang.
- (6) Bappeda Litbang melakukan verifikasi seluruh rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud dalam poin 5 angka (1) dan angka (2) di atas paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja PD.
- (7) Bappedalitbang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (8) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
- (9) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam angka (8) di atas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kab. Banjar Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan ,tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 Tanggal 31 Desember 2018;
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar.
15. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/ 143/PPE-Bappedalitbang Tanggal 14 Februari 2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renja adalah :

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah:

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 atau sumber dan lainnya.
2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran.
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2027.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2027 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Bab IV. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Bab V. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki. dalam rangka pencapaian Misi pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke II dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

- Misi ke 2**

: Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
- Tujuan 2**

: Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif
- Sasaran 2.3**

: Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah
- Indikator Sasaran**

: Indeks Konektivitas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Bupati Banjar Tahun 2021 Nomer 56). Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berikut adalah program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025:

RENJA Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar merupakan RENJA tahun ketiga untuk Periode RENSTRA tahun 2025-2029 Kepala Daerah terpilih. Hasil capaian Tahun 2025 pada Program/Kegiatan telah memenuhi target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perhubungan

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas	RKTJ (Rasio konektivitas transportasi Jalan) = (RKAP (Rasio konektivitas angkutan umum) + RKTSDP (Rasio konektivitas transportasi Sungai Danau Penyeberangan) / 2 RKAP = Jumlah kecamatan yang telah terlayani Pelayanan Angkutan Umum) dibagi dengan (jumlah Kecamatan sekabupaten Banjar) RKTSDP = (Jumlah Dermaga yang telah terbangun) dibagi dengan (Jumlah Dermaga Eksisting dan Rencana Dermaga dalam Kebutuhan Dermaga)	Rasio	0,57
	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	100% - (Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum termasuk pada trayek yang ditetapkan oleh Pemda) dibagi dengan (total perjalanan angkutan penumpang umum pada trayek yang ditetapkan oleh Pemda)*100%	Persen	99,5
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP dari hasil Penjaminan Kualitas (tim inspektorat)	Persen	79
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Yang lewat pada ruas jalan dibagi kapasitas jalan sesuai perhitungan PKJI	Indeks	0,37
Meningkatnya Ketaatan dan	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Kondisi yang diharapkan (100%)	Persen	85,5

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
keselamatan Berlalu Lintas		dikurangi persentase jumlah pelanggaran		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan pemantauan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Audit Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Kendaraan yang melanggar dibagi jumlah kendaraan yang dirazia dikalikan 100 %	Laporan	2
Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dibagi kebutuhan perlengkapan jalan	Persen	60
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	135
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	50
Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan dibagi kebutuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dikali 100%	Persen	100
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran	Laporan	12
Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi serta perhitungan arus lalu lintas harian rata-rata (LHR) dalam rangka evaluasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	2
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Forum LLAJ dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas	Laporan	2

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
Terlaksananya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada ruas jalan tertentu	Dokume n	6
Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lain	Laporan	4
Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Objek wajib andalalin yang memiliki rekomendasi dibagi potensi objek wajib andalalin dikali 100%	Persen	72,5
Terawasnya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasnya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	2
Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	(Jumlah Hasil Pemeriksaan Kendaraan yang lulus uji / Target Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Tahun N) X 100%	Persen	80
Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	(Jumlah Kendaraan yang lulus uji / Jumlah Kendaraan yang diuji) x 100%	Persen	100
Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	6050
Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokume n	4500
Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur	Laporan	0

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
Berkala Kendaraan Bermotor	Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik	(Jumlah Sarana Prasarana PKB dalam keadaan baik/Jumlah Sarana Prasarana PKB) X 100%	Persen	100
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	5
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	1
Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%	Persen	100
Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir	jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%	Persen	100
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/kota	Laporan	12
Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Jumlah Trayek yang Aktif dibagi Jumlah Trayek yang Ditetapkan kali 100%	Persen	16,67
Tersedianya Angkutan Umum	Persentase angkutan umum dengan tingkat	Jumlah trayek angkutan umum dengan kinerja tingkat	Persen	70

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	kinerja pelayanan yang baik	pelayanan yang baik dibagi jumlah trayek angkutan umum yang ada dikali 100%		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	12
Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	Jumlah Dokumen yang Direalisasikan dibagi dengan dokumen yang direncanakan kali 100%	Persen	100
Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokume n	1
Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	(Bobot keterpenuhan terminal (fasilitas utama dan pendukung) x realisasi keterpenuhan terminal) + (Bobot ketersediaan	Persen	56,34

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
		Prasarana Jalan x realisasi ketersediaan Prasarana Jalan)		
Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	(Jlh fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia/ Jlh fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dgn standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan)*100%	Persen	70
Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah terminal yang dilakukan pengembangan pertahunnya	Unit	1
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah fasilitas utama dan pendukung yang dipelihara dan direhabilitasi pertahun	Unit	4
Terpenuhinya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	Jumlah Prasarana Jalan yang tersedia dibagi kebutuhan Prasarana Jalan	Persen	47
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	3
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Bobot keterpenuhan dermaga dikali realisasi keterpenuhan dermaga) + (Bobot ketersediaan kapal yang sesuai standar dikali realisasi ketersediaan kapal yang sesuai standar	Persen	46,89
Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Jumlah Dermaga/Shelter * bobot 25% + Kondisi Dermaga * bobot 25% + Perencanaan *	Persen	45

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
		bobot 25% + Pengawasan * bobot 25%		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan/Dermaga Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokume n	2
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara dalam tahun anggaran	Unit	8
Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun dalam tahun anggaran	Unit	4
Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Jumlah ASD yang terfasilitasi dan tersosialisasi	Persen	9
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraa n Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	12
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Laporan	1

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraa n Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen yang Direalisasikan dibagi dengan dokumen yang direncanakan kali 100Persen	Persen	100
Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokume n	1
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Nilai IKKI dari hasil Penjaminan Kualitas (tim inspektorat)	Indeks	90,25
Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase terpenuhinyaa dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis seperti renstra dan renja	Dokume n	2

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (RKA & RKP-P,DPA & DPA-P)	Dokume n	4
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD (LKJIP, LPPD dan LKPJ)	Laporan	3
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan	Laporan	4
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen Walidata yang terisi	Dokume n	1
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang terisi	Data	1
Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan	Orang/bu lan	64
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang terverifikasi	Dokume n	500

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahun n-1	Laporan	1
Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persentase tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12
Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	108
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7
Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraa n penunjang administrasi perkantoran	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Jumlah Pengadaan BMD dibagi jumlah Kebutuhan dikali 100Persentase	persen	100
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	35
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18
Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	
			Satuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
	Umum Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan		
Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	58
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1

Sumber Data: Dokumen Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melaksanakan 3 program, jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan, jumlah sub kegiatan sebanyak 56 sub kegiatan yang dikelola untuk mendukung pencapaian sasarannya adalah sebesar **Rp24.264.619.959,00** (Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 20.364.982.339,00** (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yaitu tercapai 83,93% dari total target.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025 untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas	RKTJ (Rasio konektivitas transportasi Jalan) = (RKAP (Rasio konektivitas angkutan umum) + RKTSDP (Rasio konektivitas transportasi Sungai Danau Penyeberangan) / 2 RKAP = Jumlah kecamatan yang telah terlayani Pelayanan Angkutan Umum) dibagi dengan (jumlah Kecamatan sekabupaten Banjar) RKTSDP = (Jumlah Dermaga yang telah terbangun) dibagi dengan (Jumlah Dermaga Eksisting dan Rencana Dermaga dalam Kebutuhan Dermaga)	Rasio	0,57	0,53	107,55 %
		Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	100% - (Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum termasuk pada trayek yang ditetapkan oleh Pemda) dibagi dengan (total perjalanan angkutan penumpang umum pada trayek yang ditetapkan oleh Pemda)*100%	Persen	99,5	99,46	100,04 %
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP dari hasil Penjaminan Kualitas (tim inspektorat)	Persen	79	78,58	100,53 %
3	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Yang lewat pada ruas jalan dibagi	Indeks	0,37	0,42	88,10 %

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
			kapasitas jalan sesuai perhitungan PKJI				
4	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Kondisi yang diharapkan (100%) dikurangi persentase jumlah pelanggaran	Persen	85,5	84	101,79 %
5	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan pemantauan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Audit Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Kendaraan yang melanggar dibagi jumlah kendaraan yang dirazia dikalikan 100 %	Laporan	2	2	100,00 %
6	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dibagi kebutuhan perlengkapan jalan	Persen	60	68,98	86,98 %
7	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	135	135	100,00 %
8	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	50	50	100,00 %
9	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan dibagi kebutuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dikali 100%	Persen	100	100	100,00 %
10	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran	Laporan	12	1	1200,00 %
11	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi serta perhitungan arus lalu lintas harian rata-rata (LHR) dalam rangka evaluasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	2	2	100,00 %

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
12	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Forum LLAJ dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas	Laporan	2	2	100,00 %
13	Terlaksananya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada ruas jalan tertentu	Dokume n	6	6	100,00 %
14	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah laporan penataan manejemen dan rekayasa lain	Laporan	4	4	100,00 %
15	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Objek wajib andalalin yang memiliki rekomendasi dibagi potensi objek wajib andalalin dikali 100%	Persen	72,5	75	96,67 %
16	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	2	2	100,00 %
17	Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	(Jumlah Hasil Pemeriksaan Kendaraan yang lulus uji / Target Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Tahun N) X 100%	Persen	80	84	95,24 %
18	Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	(Jumlah Kendaraan yang lulus uji / Jumlah Kendaraan yang diuji) x 100%	Persen	100	100	100,00 %
19	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	6050	6050	100,00 %
20	Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokume n	4500	4500	100,00 %
21	Tersosialisasinya Standar Operasional	Jumlah Laporan Sosialisasi	Jumlah Laporan Sosialisasi	Laporan	0	0	#DIV/0 !

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
	Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
22	Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik	(Jumlah Sarana Prasarana PKB dalam keadaan baik/Jumlah Sarana Prasarana PKB) X 100%	Persen	100	100,00	100,00 %
23	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	5	5	100,00 %
24	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	1	1	100,00 %
25	Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%	Persen	100	100	100,00 %
26	Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir	jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%	Persen	100	100	100,00 %
27	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/kota	Laporan	12	12	100,00 %
28	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Jumlah Trayek yang Aktif dibagi Jumlah Trayek yang Ditetapkan kali 100%	Persen	16,67	25	66,68 %
29	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Jumlah trayek angkutan umum dengan kinerja tingkat pelayanan yang baik dibagi jumlah trayek angkutan umum	Persen	70	5	1400,00 %

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
			yang ada dikali 100%				
30	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00 %
31	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	12	12	100,00 %
32	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	Jumlah Dokumen yang Direalisasikan dibagi dengan dokumen yang direncanakan kali 100%	Persen	100	100	100,00 %
33	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokume n	1	1	100,00 %
34	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	(Bobot keterpenuhan terminal (fasilitas utama dan pendukung) x realisasi keterpenuhan terminal) + (Bobot ketersediaan Prasarana Jalan x realisasi ketersediaan Prasarana Jalan)	Persen	56,3 4	59,37	94,90 %
35	Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	(jlh fasilitas penyelenggaraa n terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia/jlh	Persen	70	68,75	101,82 %

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
			fasilitas penyelenggaraa n terminal penumpang angkutan jalan sesuai dgn standar pelayanan penyelenggaraa n terminal angkutan jalan)*100%				
36	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah terminal yang dilakukan pengembangan pertahunnya	Unit	1	1	100,00 %
37	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah fasilitas utama dan pendukung yang dipelihara dan direhabilitasi pertahun	Unit	4	4	100,00 %
38	Terpenuhinya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	Jumlah Prasarana Jalan yang tersedia dibagi kebutuhan Prasarana Jalan	Persen	47	50	94,00 %
39	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	3	3	100,00 %
40	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	2	100,00 %
41	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Bobot keterpenuhan dermaga dikali realisasi keterpenuhan dermaga) + (Bobot ketersediaan kapal yang sesuai standar dikali realisasi ketersediaan kapal yang sesuai standar	Persen	46,8 9	53,89	87,01 %
42	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Jumlah Dermaga/Shelte r *bobot 25% + Kondisi Dermaga * bobot 25% + Perencanaan * bobot 25% + Pengawasan * bobot 25%	Persen	45	48	93,75 %
43	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan/Derm aga Sungai dan	Dokume n	2	2	100,00 %

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
		Danau yang dilaksanakan	Danau yang Dilaksanakan				
44	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara dalam tahun anggaran	Unit	8	8	100,00 %
45	Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun dalam tahun anggaran	Unit	4	4	100,00 %
46	Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Jumlah ASD yang terfasilitasi dan tersosialisasi	Persen	9	7	128,57 %
47	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraa n Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraa n Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	12	12	100,00 %
48	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraa n Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraa n Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00 %
49	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	Jumlah Dokumen yang Direalisasikan dibagi dengan dokumen yang direncanakan kali 100Persen	Persen	100	100	100,00 %

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
		Sungai dan Danau					
50	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokume n	1	1	100,00 %
51	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Nilai IKKI dari hasil Penjaminan Kualitas (tim inspektorat)	Indeks	90,2 5	80,88	111,59 %
52	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase terpenuhinyaa dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100,00 %
53	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis seperti renstra dan renja	Dokume n	2	2	100,00 %
54	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (RKA & RKP-P,DPA & DPA-P)	Dokume n	4	4	100,00 %
55	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD (LKJIP, LPPD dan LKPJ)	Laporan	3	3	100,00 %
56	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan	Laporan	4	4	100,00 %
57	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen Walidata yang terisi	Dokume n	1	1	100,00 %

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
58	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang terisi	Data	1	1	100,00 %
59	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100,00 %
60	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan	Orang/b ulan	64	64	100,00 %
61	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang terverifikasi	Dokume n	500	500	100,00 %
62	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahun n-1	Laporan	1	1	100,00 %
63	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persentase tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00 %
64	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100,00 %
65	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	100	100,00 %
66	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	108	108	100,00 %
67	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	7	100,00 %
68	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasnya penyelenggaraa	Persentase Terpenuhinya Pelayanan	persen	100	100	100,00 %

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
		n penunjang administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
69	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00 %
70	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00 %
71	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00 %
72	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00 %
73	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00 %
74	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00 %
75	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Jumlah Pengadaan BMD dibagi jumlah Kebutuhan dikali 100Persentase	persen	100	100	100,00 %
76	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	4	100,00 %
77	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	35	35	100,00 %
78	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	18	100,00 %
79	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100,00 %
80	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00 %

N o.	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realis asi	Capai an (%)
				Satuan	Tah un 202 5		
1	2	3	4	5	7	8	9
81	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00 %
82	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100,00 %
83	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00 %
84	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	25	100,00 %
85	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	58	58	100,00 %
86	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00 %

Sumber Data: Dinas Perhubungan Tahun 2025

2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan;

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia dan dana operasional sehingga dapat merealisasikan target-target pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Di dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota, Dishub Kab Banjar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya yaitu untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan meningkatkan pelayanan masyarakat bidang transportasi di Kab. Banjar pada umumnya.
2. Pada layanan pengujian kendaraan bermotor pembagian tugas bagi setiap penguji sudah jelas, setiap penguji bertanggung jawab pada masing-masing alat uji, SOP Pengujian yang lengkap dan kerjasama Bank Kalsel menambah kepercayaan masyarakat untuk melakukan pengujian.
3. Pada penerapan manajemen rekayasa lalu lintas didukung antar bidang pada dinas perhubungan serta pihak terkait seperti kepolisian dan relawan.
4. Pada sub kegiatan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin di dukung oleh akan ada peraturan andalalin melalui proses OSS (*Online Single Submission*) sehingga dishub sebagai verifikator dokumen yang diajukan pemohon melalui OSS dari Kementerian BKPM.
5. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di dukung oleh kerjasama Tim dan Manajemen operasional pengendalian lalu lintas yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas lapangan, Sumber Daya Manusia tenaga penunjang kegiatan bidang perhubungan (tenaga honorer/PTT) yang sigap dan cepat tanggap dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
6. Pada saat rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota bersama sopir angkutan desa yang ada di Kabupaten Banjar dimediasi oleh BPTD wilayah XV Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dishub Kab. Banjar.

Faktor penghambat sasaran ini adalah :

1. Pada layanan pengujian kendaraan bermotor jumlah tenaga penguji masih kurang dan alat pengujian yang tersedia hanya 1 (satu) line sehingga apabila ada kerusakan salah satu maka pengujian tidak bisa dilaksanakan.

2. Pada manajemen dan rekayasa lalu lintas kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas baik dalam hal merekayasa maupun personel di lapangan dan rundown acara yang berubah-ubah sehingga harus melakukan rekayasa lalu lintas ulang.
3. Kebutuhan fasilitas keselamatan belum bisa terpenuhi karena keterbatasan anggaran.
4. Pada sub kegiatan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin terhambat dalam pelaksanaan karena peraturan daerah menempel dengan dokumen Lingkungan Hidup sehingga Dishub dilibatkan di tahap akhir.
5. Adanya Jadwal Kegiatan dalam waktu yang bersamaan sehingga jumlah personil yang dibutuhkan tidak mencukupi pada saat acara atau kegiatankegiatan tertentu
6. Masih kurangnya tenaga teknis yang berkompetensi yaitu untuk tenaga PPNS dan Tenaga Teknis Audit Keselamatan LLAJ
7. Tingkat kenyamanan angkutan kota yang belum maksimal. Keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat adalah sebagian besar dikarenakan kondisi fisik angkutan yang tidak maksimal atau bahkan lebih buruknya sudah tidak layak jalan. Dilihat dari segi kondisi fisik, sebagian angkot memang masih terlihat usang dan rusak. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat enggan menggunakan jasa angkot sebab mereka membutuhkan jasa transportasi umum yang nyaman. Jumlah penumpang semakin menurun berdampak pada jumlah angkutan desa yang semakin berkurang sehingga menurun juga jumlah angkutan yang memperpanjang izin trayek.
8. Fasilitas terminal yang sering hilang dicuri.
9. Fasilitas terminal yang dirusak oleh orang tidak bertanggungjawab.
10. Masih banyak parkir liar.
11. Kurangnya fasilitas pendukung bagi juru parkir seperti rompi dan plang parkir.

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah;

Bidang Angkutan Perhubungan Darat

1. Belum adanya kejelasan dari pemerintah tentang aturan yang terkait dengan trayek pada tahun 2023.
2. Menurunnya minat masyarakat terhadap Angkutan umum di Kabupaten Banjar.

3. Belum adanya struktur kepengurusan Organda di Kabupaten Banjar.
4. Kesadaran pemilik kapal untuk melaporkan data kapal masih belum ada.
5. Pemeliharaan alur sungai dipengaruhi oleh pasang surut air pada bulan-bulan tertentu, sehingga untuk melakukan pemeliharaan harus menunggu hingga muka air surut.
6. Anggaran minim dalam kegiatan survey angkutan sungai dan danau dan angkutan jalan serta belanja bidang dan seksi.
7. Izin kelaikan kapal yang bukan tupoksi dishub melainkan tupoksi kementerian perhubungan melalui BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Belum adanya SK trayek Angkutan sungai dan danau dari bagian hukum Setda Kab. Banjar.

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

1. Kurangnya Ahli IT untuk mengelola Inovasi Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Perhubungan (SISPRAHUB).
2. Usulan Kebutuhan Prasarana dari Masyarakat yang belum dilengkapi data dukung.
3. Usulan Kebutuhan Prasarana dari Masyarakat yang belum dilengkapi data dukung.
4. Kurangnya SDM yang ahli dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Data Base Jaringan Jalan dan Kinerja Jaringan Jalan Yang Belum Di Miliki Secara Menyeluruh.
6. Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang Belum Terpenuhi Pada Setiap Jalan Kabupaten yang ada di Setiap Kecamatan.
7. Kurangnya SDM di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan terkait Monitoring dan Evaluasi seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Perhubungan, Serta Keahlian Pengelola Sarana dan Perhubungan.
8. Fasilitas Alat Kantor diruangan seperti PC Unit/Komputer, ATK, Printer yang tidak tersedia sepenuhnya pada setiap pegawai.
9. Peralatan Survey Sarana, Prasarana serta Jaringan dan Fasilitas Perhubungan baik untuk Pemetaan ataupun di Lapangan yang belum tersedia seperti Drone, Counter, Speed Gun, Walking Measure dan lainnya.
10. Perlunya Data Dukung Dalam Permohonan Kegiatan Dana APBN seperti Pengadaam Dermaga, Halte, Fasilitas Perlengkapan Jalan (APILL, Warning Light, Rambu dan Lainnya).

Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat

1. Perkembangan teknologi IT mendorong penataan kota yang maju, kebutuhan akan pemantauan dan pengaturan lalu lintas secara elektronik, perlunya kelengkapan pemasangan ITS/ ATCS (CCROOM yang memadai, kamera pengawas pada setiap simpang dan koneksi internet yang handal).
2. Berkembangnya ilmu teknologi harus diimbangi dengan SDM yang benar-benar menguasai di Bidang IT Khususnya pemrograman dan elektronik.
3. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi PPNS, Teknisi APILL serta kompetensi pada Bidang Lalu Lintas lainnya.
4. Database Bidang Perhubungan yang minim, menyulitkan dalam berinovasi dan penentuan kebijakan untuk kemajuan penataan wilayah.
5. Alat pengamanan lalu lintas serta perlengkapan keselamatan lalu lintas yang kurang (misalnya: water barrier, traffic cone, rambu portable, armada pengangkutan serta armada pengamanan), membuat kurang optimalnya kegiatan pada Bidang Lalu Lintas.
6. Angka kecelakaan lalu lintas terus semakin meningkat karena kurang atau lemahnya pengawasan dan penindakan pada pelanggar lalu lintas.
7. Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas (misalnya: tata cara berkendara, memahami arti rambu, alat keselamatan, dll).
8. Peralatan survey lalu lintas yang tidak ada (drone, walking measure, GPS, speed gun, counter, dll).
9. Kurangnya perlengkapan kerja kantor (komputer, printer dan ATK).
10. Kurangnya koordinasi dari instansi terkait dalam menunjang pelaksanaan program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Masih banyaknya petugas lapangan pengatur lalu lintas yang belum sepenuhnya memahami peraturan perundang-undangan LLAJ, tata cara pengaturan lalu lintas di jalan raya, penerapan fungsi keselamatan LLAJ, fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan.

UPT Terminal dan Parkir

1. Perangkat komputer belum tersedia (komputer saat ini swadaya sendiri).
2. Meminimalisir parkir liar di wilayah Kabupaten Banjar.
3. Kurangnya pengetahuan petugas tentang tata pengelolaan terminal dan perpustakaan yang baik.

4. Kantor UPT tidak bertempat di terminal sehingga pengawasan areal terminal kurang maksimal.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Berkaitan dengan Alat tulis Kantor dalam sub kegiatan Registrasi Pengujian Kendaraan Bermotor sangat minim.
2. Kurangnya perangkat Komputer.
3. SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang kurang.
4. Kurangnya anggaran Diklat, pelatihan penguji

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Bidang Angkutan Perhubungan Darat

1. Diharapkan kedepannya ada kejelasan tentang trayek dan tindak lanjut rencana sebelumnya untuk tetap dilakukan pelayanan izin angkut.
2. Pada hari-hari tertentu kegiatan keagamaan tersedianya angkutan desa yang digunakan sebagai sarana menjemput maupun mengantar masyarakat untuk giat keagamaan.
3. Tersedianya organda yang akan menjembatani antara kepentingan sopir angkot dengan dishub Kab. Banjar. Organisasi Angkutan Darat (Organda) dibentuk bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggotanya, yaitu pengusaha angkutan agar usaha angkutan jalan di Kabupaten Banjar menjadi kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi.
4. Tenaga teknis yang telah memiliki kompetensi selanjutnya membuat perencanaan dan kegiatan sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Melakukan kegiatan survey dan monitoring evaluasi angkutan sungai dan danau dan angkutan jalan.
6. Memberikan izin usaha dan izin operasi bagi kapal angkutan sungai dan danau yang ada di Kabupaten Banjar.
7. Mengusulkan SK trayek Angkutan sungai dan danau ke bagian hukum Setda Kab.Banjar, SK trayek sebagai dasar untuk memberikan izin usaha dan izin operasi angkutan sungai dan danau.

Bidang Sarana Prasarana Perhubungan Darat

1. Penambahan SDM yang Ahli di Bidang IT atau Pelatihan SDM yang ada di Bidang IT untuk mengelola SISPRAHUB

2. Mengusulkan dan Menyediakan Anggaran untuk Membuat Kajian Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perlengkapan Jalan.
3. Menyediakan anggaran untuk Peningkatan Kualitas dan Keahlian SDM di Bidang Sarpras dengan Bintel dan Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Menyediakan Anggaran untuk pekerjaan Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Kinerja Jaringan LLAJ.
5. Menyediaakn Anggarakan dengan Skala Prioritas berupa Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Sesuai Kebutuhan Pada Setiap Jalan Kabupaten yang ada di Kecamatan.
6. Koordinasi dengan BKDPSPDM dalam Penganggaran Diklat & Bimtek dalam Peningkatan SDM di Bidang SarPras baik Diklat PPNS atau Diklat lainnya di Bidang Perhunungan.
7. Menyediakan anggaran tambahan untuk pemenuhan perlengkapan kantor seperti Komputer, Printer dan ATK serta Kursi dan Meja.
8. Penyediaam Anggaran Tambahan dengan Pengadaan Alat Survey Sarana & Prasarana, serta Jaringan dan Fasilitas Perhubungan seperti Drone, Speed Gun, Walking Measure, Counter, dan alat survey lainnya.
9. Menguslkan dan Menyediakan Anggaran Pada Sub Kegiatan berupa Pekerjaan untuk Mendukung Permohonan tersebut seperti Pembuatan Kajian SID, FS, DED, RAB dan Data Dukung Lainnya.

Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat

1. Menyediakan anggaran atau pemenuhan perlengkapan ITS/ATCS yang kurang (Penganggaran Pembuatan CCROOM, CCTV Pemantau Arus Lalu Lintas, dan koneksi Internet yang Handal).
2. Menyediakan Anggaran Tambahan SDM yang Mahir dan Membidangi bidang IT (SDM Pemrograman dan Elektro).
3. Menyediakan Anggaran Diklat Diklat Teknis Bidang Lalu Lintas (Diklat PPNS, Teknisi APILL, Andalalin, dll).
4. Menyediakan Anggaran untuk Penghimpunan Database atau Study Bidang Lalu Lintas (Tatralok, Rencana Induk, DRK, LHR, Trayek, dll).
5. Menyediakan Anggaran Pengadaan Faskes, Water Barrier, Traffic Cone, Pick Up, Mobil Patwal dan Kendaraan R2 untuk Patroli.
6. Menyediakan Anggaran Tambahan untuk Kegiatan Pengamanan dan Kegiatan Razia.
7. Menyediakan Anggaran untuk Melakukan Sosialisasi Keselamatan dan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Umum.
8. Menyediakan Anggaran untuk pengadaan alat-alat survey lalu lintas (Drone, Walking Maesure, GPS, Speed Gun, Counter, dll).

9. Menyediakan Anggaran Tambahan untuk Pemenuhan Perlengkapan Kantor (Komputer, Printer dan ATK).
10. Menyediakan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan koordinasi dan konsultasi teknis Bidang Lalu Lintas dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun horizontal.
11. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek/ Diklat Teknis Dasar Perhubungan Darat dan Pelatihan Pengaturan Lalu Lintas.

UPT Terminal dan Parkir

1. Menyediakan anggaran untuk pengadaan perangkat komputer baik berupa PC ataupun Laptop.
2. Menyediakan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap perpajakan di wilayah Kab. Banjar.
3. Mengusulkan diklat tentang tata kelola terminal dan perpajakan.
4. Mengusulkan pembangunan kantor UPT terminal.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Melaksanakan inovasi yang berbasis IT dan data elektronik (inovasi Langkar).
2. Memberikan anggaran pengadaan Komputer.
3. Melaksanakan kolaborasi bersama BKD untuk meningkatkan SDM Penguji dan menambah Jumlah Penguji.
4. Anggaran langsung pada DPA Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

2.1.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu (Tahun 2025) dan Perkiraan Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen Renja yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada lampiran halaman 399 point C.5. perihal Penyajian Dokumen Renja. Disebutkan bahwa pada sub bab 2.1.1 ini Perangkat Daerah diminta untuk menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun lalu merupakan tahun n-2) atau tahun 2024. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan tersebut beserta hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target periode akhir Renstra Perangkat Daerah pada periode tersebut. Untuk mendukung tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2025 - 2029 yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN KEADILAN". Dimana untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi yaitu :

- 1) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya;
- 2) Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3) Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan; dan
- 4) Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Maka pada tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sesuai dengan urusan perhubungan yang menjadi tanggung jawabnya, telah menetapkan 3 program, 19 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp.14.508.676.769,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) guna mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar secara khusus dan secara umum mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih. Adapun untuk hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 ini saat penyusunan dokumen Ranwal Renja ini disusun belum dapat dilakukan perhitungan karena saat ini baru memasuki tahun perencanaan 2026. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu (Tahun 2025) dan Perkiraan Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini

Tabel 2. 3 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR S/D TAHUN 2025

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rasio Konektivitas	Rasio	0,63	89,99	0,57	0,53	92,98%	92,50	0,00	0,00%
						Tingkat Keselamatan	Persen	99,52	-	99,50	99,46	99,96%		0,00	0,00%
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Internal (IKKI)	Indeks	90,50	87,00	90,25	80,88	89,62%	80,00	0,00	0,00%
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00%
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan, DPA, DPAP, RKA, RKAP)	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	2,00	1,00	50,00%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00%	4,00	2,00	50,00%
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	3,00	3,00	100,00%
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00%	4,00	1,00	25,00%
2	15	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1,00	n/a	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%
2	15	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	Data	1,00	n/a	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah									
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00%
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	64,00	37,00	64,00	64,00	100,00%	66,00	66,00	103,13%
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	993,00	500,00	500,00	100,00%	12,00	3,00	25,00%
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	25,00	25,00%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	12,00	3,00	25,00%
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	25,00	25,00%
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0,00	-	108,00	108,00	100,00%	-	-	#VALUE!
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	18,00	15,00	7,00	7,00	100,00%	7,00	0,00	0,00%
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	10000,00%	100,00	100,00	25,00	25,00%
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,25	25,00%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan	Paket	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,25	#DIV/0!
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Paket	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,50	25,00%
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	Paket	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,25	25,00%
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	12,00	3,00	25,00%
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	12,00	3,00	25,00%
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	10000%	100,00	100,00	25,00	25,00%
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0,00	2,00	4,00	4,00	100,00%	-	-	#VALUE!

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10,00	21,00	35,00	35,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan	Unit	10,00	13,00	18,00	18,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	25,00	25,00%
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	12,00	3,00	25,00%
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	12,00	3,00	25,00%
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	10000%	100,00%	100,00	25,00	25,00%
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peliharaan dan di Bayarkan Pajaknya									
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30,00	31,00	25,00	25,00	100,00%	15,00	15,00	50,00%
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di Pelihara	Unit	60,00	50,00	58,00	58,00	100,00%	60,00	20,00	33,33%
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di Pelihara/ di Rehabilitasi	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Persen	25,00	8,33	16,67	25,00	149,97%	70.19%	0,00	0,00%
2	15	02	2.14		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	83,33	70,15	70,00	5,00	7,14%	62,50	0,00	0,00%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	12,00	4,00	12,00	12,00	100,00%	12,00	3,00	25,00%
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah angkutan umum yang tersedia dan beroperasi	Persen	100,00	n/a	-	-	#VALUE!	100,00	100,00	100,00%
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Jumlah armada angkutan Umum	Unit	25,00	n/a	-	-	#VALUE!	19,00	0,00	#DIV/0!

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	#VALUE!	#VALUE!
2	15	02			2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Persen	81,00	-	-	-	-	80,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Teknis dan Laik Jalan									
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1,00	1,00	5,00	5,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	5400,00	5850,00	6050,00	6050,00	100,00%	5300,00	798,00	14,78%
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	5200,00	-	4500,00	4500,00	100,00%	4500,00	4500,00	86,54%
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1,00	-	0,00	0,00	#DIV/0!	-	-	#VALUE!
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	13,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Persen (%)	67,00%	-	56,34	59,37	105,38%	80,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	Persen	80,00%	63,00	70,00	68,75	98,21%	68,75	0,00	0,00%
2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	4,00	3,00	4,00	4,00	100,00%	4,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Persen (%)	70,00%	80,00	60,00	68,98	114,97%	65,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	37,00	128,00	135,00	135,00	100,00%	25,00	25,00	67,57%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	32,00	80,00	50,00	50,00	100,00%	20,00	0,00	0,00%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Persen (%)	0,36	0,38	0,37	0,42	113,51%	0,36	0,00	0,00%
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persen (%)	100,00	0,38	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12,00	12,00	12,00	1,00	8,33%	12,00	3,00	25,00%
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	-	#VALUE!

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2,00	1,00	2,00	2,00	100,00%	-	-	#VALUE!
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	6,00	5,00	6,00	6,00	100,00%	2,00	1,00	16,67%
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	4,00	10,00	4,00	4,00	100,00%	-	-	#VALUE!
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persen (%)	77,50	75,00	72,50	75,00	103,45%	-	-	#VALUE!

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	4,00	5,00	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	0,00	15,00	2,00	2,00	100,00%	-	-	#VALUE!
2	15	02	2.07	0007	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	4,00	1,00	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Persen (%)	87%	85,58	85,50	84,00	98%	-	-	#VALUE!
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	-	#VALUE!
2	15	02			2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kawasan Parkir Tertib	Persen	12,00	-	100,00	100,00	100,00%	10,00	0,00	0,00%
2	15	02	2.04		2.15.02.2.04 Penerbitan Izin	Persentase juru parkir yang terbina	Persen	50,00	-			#DIV/0!	-	-	#VALUE!

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir										
2	15	02	2.04	0001	2.15.02.2.04.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	-	#VALUE!
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	Persen (%)	100%	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	10000,00%
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	12,00	3,00	5,00%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	56,45%	50,00	9,00	7,00	0,78	51,67	0,00	0,00%
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen (%)	15%	70,00	12,00	12,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
2	15	03	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Terintegrasi Secara Elektronik									
2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%
2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00%	-	-	#VALUE!
2	15	03	2.09	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan	Dokumen	0,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	-	#VALUE!

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW 1 tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2	15	03	2.13		2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Persen	61%	70,00	45,00	48,00	1,07	48,00	0,00	0,00%
2	15	03	2.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen	1,00	1,00	2,00	2,00	1	-	-	#VALUE!
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	2,00	6,00	4,00	4,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1,00	1,00	8,00	8,00	100,00%	2,00	0,00	0,00%

2.1.3 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun n-2)

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan hingga tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagaimana terdapat pada sub bab 2.1.1. di atas.

Dari tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun awal perencanaan 2024 yang lalu diketahui secara umum capaian Renstra Perangkat Daerah mengalami peningkatan hal ini sehubungan dengan pelaksanaan keempat dari periode Renstra Perubahan 2025-2029. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berkomitmen untuk bisa meraih target periode akhir Renstra dengan melakukan langkah-langkah nyata sesuai dengan ketehtuan perundangan untuk mencapai target periode akhir Renstra Dinas Perhubungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan "Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Capaian kinerja pelayanan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar di ukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sebagaimana dapat di lihat pada table 2.4 di bawah ini:

Tabel 2. 4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD 2025-2029 (Tahun Ke-)					Realisasi Capaian		Proyeksi Realisasi			Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	Tahun N+2	Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	Tahun N+2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rasio Konektivitas			0,51	0,57	0,63	0,68	0,74	0,949	-	0,63	0,68	0,74	Rasio Konektivitas Kabupaten Banjar = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) 1. IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut $\text{Hasil Perhitungan IK1} = \frac{12 \times 1}{12} = 1,00$ 2. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut). $\text{Hasil Perhitungan IK1} = \frac{(2 \times 1)+(1 \times 0,5)}{3}$ Hasil Perhitungan Rasio Konektivitas Kabupaten Banjar (1,00 x 0,7) + (0,83 x 0,3) = <u>0,949</u>
2	Tingkat Keselamatan			99,48	99,5	99,52	99,55	99,57	99.96 %	-	99,52	99,55	99,57	Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota mempunyai target 99,5 persen dan telah terealisasi 99,46 persen sehingga memperoleh predikat capaian sangat tinggi dengan nilai 99.96 persen. Capaian Indikator kinerja = (Realisasi / Rencana) x 100 % Capaian Indikator Kinerja = (99,46/ 99,5) x 100% = 99.96 %
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			78,6	79	79,3	79,8	80,2	78,58	-	79,3	79,8	80,2	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi dan Tata Kerja, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Bupati Banjar Tahun 2021 Nomer 56). Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menghadapi tantangan dalam pengembangan pelayanan diantaranya sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi jalan yang memenuhi standar keselamatan.
2. Belum Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak.
3. Belum Terpenuhinya Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan.
4. Belum Meningkatnya kelancaran lalu lintas.
5. Belum Meningkatnya Keselamatan Transportasi.
6. Belum Meningkatnya kelancaran lalu lintas.
7. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar Keselamatan.
8. Belum Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak.
9. Belum Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak.
10. Menurunnya minat masyarakat terhadap Angkutan umum di Kabupaten Banjar.
11. Belum adanya struktur kepengurusan Organda di Kabupaten Banjar.
12. Kesadaran pemilik kapal untuk melaporkan data kapal masih belum ada.
13. Pemeliharaan alur sungai dipengaruhi oleh pasang surut air pada bulan-bulan tertentu, sehingga untuk melakukan pemeliharaan harus menunggu hingga muka air surut.
14. Anggaran minim dalam kegiatan survey angkutan sungai dan danau dan angkutan jalan serta belanja bidang dan seksi.
15. Izin kelaikan kapal yang bukan tupoksi dishub melainkan tupoksi kementrian perhubungan melalui BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Belum adanya SK trayek Angkutan sungai dan danau dari bagian hukum Setda Kab. Banjar.

17. Kurangnya Ahli IT untuk mengelola Inovasi Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Perhubungan (SISPRAHUB).
18. Usulan Kebutuhan Prasarana dari Masyarakat yang belum dilengkapi data dukung.
19. Usulan Kebutuhan Prasarana dari Masyarakat yang belum dilengkapi data dukung.
20. Kurangnya SDM yang ahli dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
21. Data Base Jaringan Jalan dan Kinerja Jaringan Jalan Yang Belum Di Miliki Secara Menyeluruh.
22. Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang Belum Terpenuhi Pada Setiap Jalan Kabupaten yang ada di Setiap Kecamatan.
23. Kurangnya SDM di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan terkait Monitoring dan Evaluasi seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Perhubungan, Serta Keahlian Pengelola Sarana dan Perhubungan.
24. Fasilitas Alat Kantor diruangan seperti PC Unit/Komputer, ATK, Printer yang tidak tersedia sepuhnya pada setiap pegawai.
25. Peralatan Survey Sarana, Prasarana serta Jaringan dan Fasilitas Perhubungan baik untuk Pemetaan ataupun di Lapangan yang belum tersedia seperti Drone, Counter, Speed Gun, Walking Measure dan lainnya.
26. Perlunya Data Dukung Dalam Permohonan Kegiatan Dana APBN seperti Pengadaam Dermaga, Halte, Fasilitas Perlengkapan Jalan (APILL, Warning Light, Rambu dan Lainnya).
27. Perkembangan teknologi IT mendorong penataan kota yang maju, kebutuhan akan pemantauan dan pengaturan lalu lintas secara elektronik, perlunya kelengkapan pemasangan ITS/ ATCS (CCROOM yang memadai, kamera pengawas pada setiap simpang dan koneksi internet yang handal).
28. Berkembangnya ilmu teknologi harus diimbangi dengan SDM yang benar-benar menguasai di Bidang IT Khususnya pemrograman dan elektronik.
29. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi PPNS, Teknisi APILL serta kompetensi pada Bidang Lalu Lintas lainnya.
30. Database Bidang Perhubungan yang minim, menyulitkan dalam berinovasi dan penentuan kebijakan untuk kemajuan penataan wilayah.
31. Alat pengamanan lalu lintas serta perlengkapan keselamatan lalu lintas yang kurang (misalnya: water barrier, traffic cone, rambu portable, armada pengangkutan serta armada pengamanan), membuat kurang optimalnya kegiatan pada Bidang Lalu Lintas.
32. Angka kecelakaan lalu lintas terus semakin meningkat karena kurang atau lemahnya pengawasan dan penindakan pada pelanggar lalu lintas.

33. Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas (misalnya: tata cara berkendara, memahami arti rambu, alat keselamatan, dll).
34. Peralatan survey lalu lintas yang tidak ada (drone, walking measure, GPS, speed gun, counter, dll).
35. Kurangnya perlengkapan kerja kantor (komputer, printer dan ATK).
36. Kurangnya koordinasi dari instansi terkait dalam menunjang pelaksanaan program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
37. Masih banyaknya petugas lapangan pengatur lalu lintas yang belum sepenuhnya memahami peraturan perundang-undangan LLAJ, tata cara pengaturan lalu lintas di jalan raya, penerapan fungsi keselamatan LLAJ, fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan.
38. Perangkat komputer belum tersedia (komputer saat ini swadaya sendiri).
39. Meminimalisir parkir liar di wilayah Kabupaten Banjar.
40. Kurangnya pengetahuan petugas tentang tata pengelolaan terminal dan perparkiran yang baik.
41. Kantor UPT tidak bertempat di terminal sehingga pengawasan areal terminal kurang maksimal.
42. Berkaitan dengan Alat tulis Kantor dalam sub kegiatan Registrasi Pengujian Kendaraan Bermotor sangat minim.
43. Kurangnya perangkat Komputer.
44. SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang kurang.
45. Kurangnya anggaran Diklat, pelatihan penguji.
46. Belum optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas.
47. Masih lemahnya pengawasan dan penindakan adanya kendaraan dengan Over Dimension Over Loading (ODOL).
48. Belum adanya skema reaksi cepat dalam penguraian kemacetan berbasis teknologi informasi.
49. Belum ada Area Traffic Control System.
50. Masih adanya ruas jalan yang belum dilengkapi fasilitas keselamatan.
51. Belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi.
52. Sebagian besar kapal air yang beroperasi tidak sesuai standar.
53. Masih rendahnya ketaatan keselamatan pelayaran.
54. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas awak kapal..
55. Masih adanya angkutan air yang tidak terdaftar.
56. Masih rendahnya kesadaran operator angkutan air untuk melakukan pemeriksaan kendaraan.

Adapun peluang yang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar antara lain sebagai berikut:

- Semakin tingginya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses usulan perencanaan pembangunan daerah khususnya bidang transportasi.
- Terbukanya peluang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM transportasi.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja transportasi dalam rangka pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Dalam hal ini pada Kabupaten Banjar sudah menerapkan Smart APILL dan Smart Card.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia dan dana operasional sehingga dapat merealisasikan target-target pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Di dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota, Dishub Kab Banjar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya yaitu untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan meningkatkan pelayanan masyarakat bidang transportasi di Kab. Banjar pada umumnya.
- Pada layanan pengujian kendaraan bermotor pembagian tugas bagi setiap penguji sudah jelas, setiap penguji bertanggung jawab pada masing-masing alat uji, SOP Pengujian yang lengkap dan kerjasama Bank Kalsel menambah kepercayaan masyarakat untuk melakukan pengujian.
- Pada penerapan manajemen rekayasa lalu lintas didukung antar bidang pada dinas perhubungan serta pihak terkait seperti kepolisian dan relawan.
- Pada sub kegiatan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin di dukung oleh akan ada peraturan andalalin melalui proses OSS (Online Single Submission) sehingga dishub sebagai verifikator dokumen yang diajukan pemohon melalui OSS dari Kementerian BKPM.
- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di dukung oleh kerjasama Tim dan Manajemen operasional pengendalian lalu lintas yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas lapangan, Sumber Daya Manusia tenaga penunjang kegiatan bidang perhubungan (tenaga honorer/PTT) yang sigap dan cepat tanggap dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

1. Diharapkan kedepannya ada kejelasan tentang trayek dan tindak lanjut rencana sebelumnya untuk tetap dilakukan pelayanan izin angkut.
2. Pada hari-hari tertentu tertentu kegiatan keagamaan tersedianya angkutan desa yang digunakan sebagai sarana menjemput maupun mengantar masyarakat untuk giat keagamaan.
3. Tersedianya organda yang akan menjembatani antara kepentingan sopir angkot dengan dishub Kab. Banjar. Organisasi Angkutan Darat (Organda) dibentuk bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggotanya, yaitu pengusaha angkutan agar usaha angkutan jalan di Kabupaten Banjar menjadi kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi.
4. Tenaga teknis yang telah memiliki kompetensi selanjutnya membuat perencanaan dan kegiatan sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan kegiatan survey dan monitoring evaluasi angkutan sungai dan danau dan angkutan jalan.
3. Memberikan izin usaha dan izin operasi bagi kapal angkutan sungai dan danau yang ada di Kabupaten Banjar.
4. Mengusulkan SK trayek Angkutan sungai dan danau ke bagian hukum Setda Kab.Banjar, SK trayek sebagai dasar untuk memberikan izin usaha dan izin operasi angkutan sungai dan danau.
1. Penambahan SDM yang Ahli di Bidang IT atau Pelatihan SDM yang ada di Bidang IT untuk mengelola SISPRAHUB
2. Mengusulkan dan Menyediakan Anggaran untuk Membuat Kajian Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perlengkapan Jalan.
3. Menyediakan anggaran untuk Peningkatan Kualitas dan Keahlian SDM di Bidang Sarpras dengan Bintek dan Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Menyediakan Anggaran untuk pekerjaan Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Kinerja Jaringan LLAJ.
5. Menyediaakn Anggaran dengan Skala Prioritas berupa Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Sesuai Kebutuhan Pada Setiap Jalan Kabupaten yang ada di Kecamatan.
6. Koordinasi dengan BKDPSPDM dalam Penganggaran Diklat & Bimtek dalam Peningkatan SDM di Bidang SarPras baik Diklat PPNS atau Diklat lainnya di Bidang Perhunungan.
7. Menyediakan anggaran tambahan untuk pemenuhan perlengkapan kantor seperti Komputer, Printer dan ATK serta Kursi dan Meja.

8. Penyediaam Anggaran Tambahan dengan Pengadaan Alat Survey Sarana & Prasarana, serta Jaringan dan Fasilitas Perhubungan seperti Drone, Speed Gun, Walking Measure, Counter, dan alat survey lainnya.
9. Mengusulkan dan Menyediakan Anggaran Pada Sub Kegiatan berupa Pekerjaan untuk Mendukung Permohonan tersebut seperti Pembuatan Kajian SID, FS, DED, RAB dan Data Dukung Lainnya.
10. Menyediakan anggaran atau pemenuhan perlengkapan ITS/ATCS yang kurang (Penganggaran Pembuatan CCROOM, CCTV Pemantau Arus Lalu Lintas, dan koneksi Internet yang Handal).
11. Menyediakan Anggaran Tambahan SDM yang Mahir dan Membidangi bidang IT (SDM Pemrograman dan Elektro).
12. Menyediakan Anggaran Diklat Diklat Teknis Bidang Lalu Lintas (Diklat PPNS, Teknisi APILL, Andalalin, dll).
13. Menyediakan Anggaran untuk Penghimpunan Database atau Study Bidang Lalu Lintas (Tatralok, Rencana Induk, DRK, LHR, Trayek, dll).
14. Menyediakan Anggaran Pengadaan Faskes, Water Barrier, Traffic Cone, Pick Up, Mobil Patwal dan Kendaraan R2 untuk Patroli.
15. Menyediakan Anggaran Tambahan untuk Kegiatan Pengamanan dan Kegiatan Razia.
16. Menyediakan Anggaran untuk Melakukan Sosialisasi Keselamatan dan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Umum.
17. Menyediakan Anggaran untuk pengadaan alat-alat survey lalu lintas (Drone, Walking Maesure, GPS, Speed Gun, Counter, dll).
18. Menyediakan Anggaran Tambahan untuk Pemenuhan Perlengkapan Kantor (Komputer, Printer dan ATK).
19. Menyediakan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan koordinasi dan konsultasi teknis Bidang Lalu Lintas dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun horizontal.
20. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek/ Diklat Teknis Dasar Perhubungan Darat dan Pelatihan Pengaturan Lalu Lintas.
21. Menyediakan anggaran untuk pengadaan perangkat komputer baik berupa PC ataupun Laptop.
22. Menyediakan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap perpustakaan di wilayah Kab. Banjar.
23. Mengusulkan diklat tentang tata kelola terminal dan perpustakaan.
24. Mengusulkan pembangunan kantor UPT terminal.
25. Melaksanakan inovasi yang berbasis IT dan data elektronik (inovasi Langkar).
26. Memberikan anggaran pengadaan Komputer.

- 27. Melaksanakan kolaborasi bersama BKD untuk meningkatkan SDM Penguji dan menambah Jumlah Penguji.
- 28. Anggaran langsung pada DPA Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

2.4 Hasil Analisa Rencana Kebutuhan

Rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar pada Tahun 2027 ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Adapun hasil analisis kebutuhan awal pada rancangan renja Dinas Perhubungan Tahun 2027 yang disusun dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				14.022.979.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				14.022.979.000,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Nilai IKKI Perangkat Daerah	90,5 Indeks	Rp 8.911.314.400,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Nilai IKKI Perangkat Daerah	90,5 Indeks	Rp 8.911.314.400,00
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	Rp 67.242.558,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	Rp 67.242.558,00
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 8.142.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 8.142.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Dokumen	Rp 17.728.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Dokumen	Rp 17.728.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dokumen RKA-SKPD					Dokumen RKA-SKPD		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Rp 10.668.558,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Rp 10.668.558,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 9.636.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 9.636.000,00
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Rp 10.534.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Rp 10.534.000,00
9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	1 Data	Rp 10.534.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	1 Data	Rp 10.534.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
10	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Rp 6.156.516.442,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Rp 6.156.516.442,00
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	Rp 5.932.509.642,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	Rp 5.932.509.642,00
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 214.560.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 214.560.000,00
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 9.446.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 9.446.800,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100%	Rp 8.752.000,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100%	Rp 8.752.000,00
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 8.752.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 8.752.000,00
16	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100%	Rp 143.991.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100%	Rp 143.991.000,00
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	Rp 143.991.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	Rp 143.991.000,00
18	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan	100%	Rp 401.117.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan	100%	Rp 401.117.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ten Banjar	penunjang administrasi perkantoran				ten Banjar	penunjang administrasi perkantoran		
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 30.639.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 30.639.000,00
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Banjar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 28.286.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Banjar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 28.286.000,00
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Banjar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 13.230.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Banjar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 13.230.000,00
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 3.370.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 3.370.000,00
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 325.592.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 325.592.000,00
24	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Pengadaan	100%	Rp 15.997.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Pengadaan	100%	Rp 15.997.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ten Banjar	Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ten Banjar	Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan		
25	Pengadaan Mebel	Kabupaten Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Rp 14.901.000,00	Pengadaan Mebel	Kabupaten Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Rp 14.901.000,00
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Banjar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 1.096.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Banjar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 1.096.000,00
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	Rp 1.366.509.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	Rp 1.366.509.000,00
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 94.799.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 94.799.000,00
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.271.710.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.271.710.000,00
30	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Kabupaten Banjar	Persentase Terpenuhinya Pelayanan	100%	Rp 751.189.400,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Kabupaten Banjar	Persentase Terpenuhinya Pelayanan	100%	Rp 751.189.400,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ten Banjar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ten Banjar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 42.750.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 42.750.000,00
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Rp 622.680.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Rp 622.680.000,00
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Rp 40.679.400,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Rp 40.679.400,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 45.080.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 45.080.000,00
35	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kabupaten Banjar	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,364 Indeks	Rp 417.950.250,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kabupaten Banjar	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,364 Indeks	Rp 417.950.250,00
36	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	70 Persen	Rp 417.950.250,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	70 Persen	Rp 417.950.250,00
37	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	Rp 81.820.000,00	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	Rp 81.820.000,00
38	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	37 Unit	Rp 197.684.491,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	37 Unit	Rp 197.684.491,00
39	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kabupaten Banjar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	Rp 38.027.250,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kabupaten Banjar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	Rp 38.027.250,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Banjar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	32 Unit	Rp 100.418.509,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Banjar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	32 Unit	Rp 100.418.509,00
41	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kabupaten Banjar	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	67 Persen	Rp 125.976.750,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kabupaten Banjar	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	67 Persen	Rp 125.976.750,00
42	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Banjar	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	80 Persen	Rp 125.976.750,00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Banjar	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	80 Persen	Rp 125.976.750,00
43	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kabupaten Banjar	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	Rp 80.620.750,00	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kabupaten Banjar	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	Rp 80.620.750,00
44	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kabupaten Banjar	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit	Rp 45.356.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kabupaten Banjar	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit	Rp 45.356.000,00
45	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS	Kabupaten Banjar	Persentase Kawasan Parkir Tertib	100 Persen	Rp 78.591.000,00	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS	Kabupaten Banjar	Persentase Kawasan Parkir Tertib	100 Persen	Rp 78.591.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
46	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Banjar	Persentase juru parkir yang terbina	50 Persen	Rp 20.000.000,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Banjar	Persentase juru parkir yang terbina	50 Persen	Rp 20.000.000,00
47	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00
48	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Banjar	Persentase Pengawasan titik Parkir	100 Persen	Rp 58.591.000,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Banjar	Persentase Pengawasan titik Parkir	100 Persen	Rp 58.591.000,00
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Laporan	Rp 58.591.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Laporan	Rp 58.591.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		
50	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	81 Persen	Rp 682.312.000,00	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	81 Persen	Rp 682.312.000,00
51	2.15.02.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Kabupaten Banjar	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	100 Persen	Rp 535.419.000,00	2.15.02.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Kabupaten Banjar	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	100 Persen	Rp 535.419.000,00
52	2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5400 Unit	Rp 366.143.000,00	2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5400 Unit	Rp 366.143.000,00
53	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5200 Dokumen	Rp 150.000.000,00	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5200 Dokumen	Rp 150.000.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Rp 19.276.000,00	2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Rp 19.276.000,00
55	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Persentase kualitas Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik	100 Persen	Rp 146.893.000,00	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Persentase kualitas Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik	100 Persen	Rp 146.893.000,00
56	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	Rp 66.973.000,00	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	Rp 66.973.000,00
57	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit	Rp 79.920.000,00	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit	Rp 79.920.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,364 Persen	Rp 1.125.283.000,00	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,364 Persen	Rp 1.125.283.000,00
59	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100 Persen	Rp 1.115.283.000,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100 Persen	Rp 1.115.283.000,00
60	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 699.992.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 699.992.000,00
61	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00
62	Pengadaan dan Pemasangan	Kabupaten Banjar	Jumlah Perlengkapan	6 Dokumen	Rp 395.291.000,00	Pengadaan dan Pemasangan	Kabupaten Banjar	Jumlah Perlengkapan	6 Dokumen	Rp 395.291.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	ten Banjar	Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan			Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	ten Banjar	Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan		
63	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	Rp 10.000.000,00	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	Rp 10.000.000,00
64	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	77,5 Persen	Rp 10.000.000,00	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	77,5 Persen	Rp 10.000.000,00
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kabupaten Banjar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	Rp 10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kabupaten Banjar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	Rp 10.000.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	25 Persen	Rp 2.099.029.600,00	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	25 Persen	Rp 2.099.029.600,00
67	2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	83,33 Persen	Rp 36.529.600,00	2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	83,33 Persen	Rp 36.529.600,00
68	2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp 17.521.600,00	2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp 17.521.600,00
69	2.15.02.2.14.0003 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	12 Unit	Rp 19.008.000,00	2.15.02.2.14.0003 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	12 Unit	Rp 19.008.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
70	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Persentase jumlah angkutan umum yang tersedia dan beroperasi	100 Persen	Rp 2.062.500.000,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Persentase jumlah angkutan umum yang tersedia dan beroperasi	100 Persen	Rp 2.062.500.000,00
71	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah armada angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	Rp 2.062.500.000,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah armada angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	Rp 2.062.500.000,00
72	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kabupa	Persentase angkutan sungai dan danau	56,45 Persen	Rp 582.522.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kabupa	Persentase angkutan sungai dan danau	56,45 Persen	Rp 582.522.000,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ten Banjar	dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik				ten Banjar	dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik		
73	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kabupaten Banjar	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	2 Persen	Rp 37.541.500,00	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kabupaten Banjar	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	2 Persen	Rp 37.541.500,00
74	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam	1 Dokumen	Rp 18.185.500,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam	1 Dokumen	Rp 18.185.500,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
75	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	1 Laporan	Rp 19.356.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	1 Laporan	Rp 19.356.000,00
76	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Banjar	Persentase Dermaga yang sesuai standar	61 Persen	Rp 544.980.500,00	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Banjar	Persentase Dermaga yang sesuai standar	61 Persen	Rp 544.980.500,00

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Banjar	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	Rp 5.523.500,00	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Banjar	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	Rp 5.523.500,00
78	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Banjar	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun	2 Unit	Rp 539.457.000,00	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Banjar	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun	2 Unit	Rp 539.457.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan pada Musrenbang Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang di kecamatan. Pada Musrenbang tingkat kecamatan terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar terutama dari kelompok masyarakat. Adapun usulan-usulan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melalui musrenbang tersebut akan diverifikasi kemudian diteruskan untuk dilaksanakan dengan dan APBD sesuai dengan alokasi dana yang tersedia. Adapaun usulan dan hasil verifikasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana berikut.

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,364	Usulan Pengadaan Rambu Pada Kecamatan Pengaron Desa Keliling Benteng 8 Unit
2	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	81%	
3	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	Persentase Kawasan Parkir Tertib	12%	
4	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	25%	
5	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Banjar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	67%	
6	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kabupaten Banjar	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	56.45%	Usulan Pembangunan 2 Dermaga - 1 Dermaga di Desa Keliling Banteng - 1 Dermaga di Desa Benua Riam

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Prioritas Nasional

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Arah Kebijakan Nasional dalam rangka mengatasi isu-isu Global, Nasional dan Lokal sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Isu-isu Global, Nasional dan Lokal

ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU LOKAL
• Demografi global • Urbanisasi dunia • Perkembangan Teknologi • Konstelasi Perdagangan Global	• Rendahnya kualitas sumber daya manusia • Pergeseran struktur kelas Masyarakat • Rendahnya produktivitas • Geopolitik dan geoekonomi	• Daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah • Penguatan SDM Unggul dan Berkarakter • Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal • Fondasi perekonomian berbasis SDA terbarukan yang masih belum kuat dan proses hilirisasi masih lambat • Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh dan Ramah Lingkungan

Untuk menjawab isu-isu tersebut, maka ditetapkan 20 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer)

A. Transformasi Sosial

- Penghapusan kemiskinan ekstrem
- Program makan bergizi gratis untuk masyarakat rentan
- Percepatan penurunan stunting
- Peningkatan kualitas pendidikan (termasuk digitalisasi pendidikan)
- Reformasi sistem kesehatan nasional

- Penguatan jaminan sosial terintegrasi

B. Transformasi Ekonomi

- Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
- Penguatan ekonomi hijau (green economy)
- Pengembangan ekonomi digital nasional
- Revitalisasi UMKM dan koperasi
- Peningkatan investasi dan kemudahan berusaha
- Penguatan ketahanan pangan nasional

C. Transformasi Tata Kelola

- Reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan
- Integrasi data nasional (satu data Indonesia)
- Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
- Penyederhanaan regulasi

D. Transformasi Infrastruktur dan Wilayah

- Pembangunan infrastruktur prioritas (transportasi, energi, air)
- Pemerataan pembangunan wilayah (desa dan kawasan tertinggal)
- Pembangunan kota berkelanjutan dan cerdas (smart city)

E. Transformasi Lingkungan dan Ketahanan

- Transisi energi bersih dan pengendalian perubahan iklim

Arah Kebijakan Pembangunan di Sektor Perhubungan Darat Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan sektor perhubungan darat tahun 2025–2029 dalam kerangka RPJMN 2025–2029 difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, efisiensi sistem logistik, serta penguatan transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi. Pemerintah menitikberatkan pada pengembangan jaringan jalan yang merata hingga ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kawasan strategis, guna mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat secara lebih efisien. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan pada penguatan sistem logistik nasional melalui digitalisasi dan integrasi simpul transportasi darat dengan moda lain seperti laut, udara, dan perkeretaapian, sehingga mampu menurunkan biaya logistik nasional.

Di sisi lain, pembangunan transportasi darat juga diarahkan untuk mendorong sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan melalui pengembangan angkutan umum massal, pengurangan kemacetan, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Transformasi digital menjadi bagian penting dalam kebijakan ini, termasuk penerapan sistem transportasi cerdas (intelligent transport system) dan digitalisasi layanan transportasi. Aspek keselamatan juga menjadi prioritas melalui peningkatan standar kendaraan, infrastruktur jalan, serta penegakan hukum lalu lintas. Secara keseluruhan, arah kebijakan ini bertujuan

menciptakan sistem transportasi darat yang aman, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan Wilayah Kalimantan berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 9,2 persen pada Tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada Tahun 2045 Kalimantan berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 11,3 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 6,7-8,0 persen per tahun. Wilayah Kalimantan berpotensi menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Seiring dengan kehadiran pembangunan Ibu Kota Nusantara serta berbagai kegiatan prioritas strategis pendukungnya, maka pembangunan Wilayah Kalimantan diarahkan sebagai "Superhub Ekonomi Nusantara" dengan 5 (lima) arah pembangunan sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di Wilayah Kalimantan.

Kedua, pembangunan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi dan interelasi antarwilayah, terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.

Ketiga, pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP.

Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan Kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/ kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kelima, peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Kelima, peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Kelima prioritas kebijakan tersebut dijabarkan menjadi arah kebijakan Wilayah Kalimantan sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci dalam proses transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang diarahkan melalui kebijakan:

- i. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- ii. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor;
- iii. Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP;
- iv. Peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui penyediaan layanan kesehatan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis, didukung teknologi untuk memperluas jangkauan layanan khususnya ke daerah afirmasi seperti layanan telemedicine untuk penduduk di daerah perbatasan;
- v. Pengembangan pelayanan kesehatan modern berstandar internasional di wilayah IKN dan mitra sekitarnya;
- vi. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
- vii. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat ke bekerjaan tinggi;
- viii. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah;
- ix. Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
- x. Pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global;
- xi. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment dan pembentukan Center of Excellence di IN;
- xii. Pembangunan sekolah baru dan perguruan tinggi yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi

- potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global dalam mendukung pembangunan IKN;
- xiii. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masin belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;
 - xiv. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di seluruh wilayah terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara melalui perlindungan sosial adaptif; dan
 - xv. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

2. Transformasi Ekonomi

Klaster ekonomi potensial masa depan yang didorong di Wilayah Kalimantan untuk mengembangkan koridor ekonomi "Superhub Ekonomi Nusantara" berfokus pada sektor ekonomi pengungkit berbasis keunggulan kompetitif dan berorientasi pada keberlanjutan. Kondisi ini diharapkan mampu menempatkan Indonesia pada posisi lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi. Upaya tersebut diarahkan melalui kebijakan:

- i. Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara bersama daerah mitra sebagai superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing;
- ii. Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan (kelapa sawit, batu bara, migas, dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri oleochemicals, petrochemicals, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi;
- iii. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan seperti biokimia pangan, herbal, dan nutrisi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri;
- iv. Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia;
- v. Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan;
- vi. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan

- dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani;
- vii. Pengembangan destinasi wisata potensial, antara lain penetapan destinasi super prioritas seperti Derawan dan sekitarnya, pengembangan eco-touris kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas has wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan;
 - viii. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik;
 - ix. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain melalui up-skilling dan re-skilling sesuai kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan yang dikembangkan melalui skema education to employment;
 - x. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan; dan
 - xi. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

Pembangunan ketenagalistrikan di Wilayah Kalimantan diarahkan untuk:

- i. Pengembangan grid skala kecil terisolasi (isolated mini grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas;
- ii. Penyediaan listrik Ibu Kota Nusantara dan daerah Mitra yang hijau, cerdas dan berkelanjutan;
- iii. Pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) untuk mendukung peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;
- iv. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi primer (Sungai Kayan) serta batu bara dan gas;
- v. Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik di wilayah Kalimantan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai pasokan di wilayah Kalimantan maupun antarpulau; dan
- vi. Mengembangkan interkoneksi antarwilayah (transmisi interkoneksi ke Sistem Jawa Sumatera) untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan (termasuk upaya perenuhan kebutuhan tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara, diperlukan pembangunan jaringan transmisi 500 kV untuk mengevakuasi daya dari PLTA di Kalimantan Utara).

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan di Wilayah Kalimantan dalam rangka transformasi digital antara lain meliputi:

- i. (i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga

menjangkau ke seluruh pelosok (utamanya di Kawasan Ibu Kota Nusantara) serta kawasan industri dan pertambangan;

- ii. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; dan
- iii. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat. menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan DM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

3. Transformasi Tata Kelola

Penguatan tata kelola diarahkan melalui kebijakan:

- i. Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;
- ii. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan;
- iii. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
- iv. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi. kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
- v. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- vi. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital; dan
- vii. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Kepemimpinan Indonesia diwujudkan melalui arah kebijakan:

- (i) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas;
- (ii) Penyelesaian permasalahan Outstanding Boundary Problems (OBP) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara;
- (iii) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan
- (iv) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

5. Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Upaya untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi akan diarahkan melalui:

- i. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- ii. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
- iii. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat di Wilayah Kalimantan;
- iv. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi;
- v. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda;
- vi. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya;
- vii. Pengembangan diversifikasi pangan;
- viii. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya tambang serta penghambatan laju deforestasi;
- ix. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
- x. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;
- xi. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya Orang Utan Borneo dan Gajah Kalimantan;
- xii. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana;
- xiii. Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim;
- xiv. Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan;
- xv. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana;
- xvi. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local;
- xvii. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;

- xviii. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan
- xix. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi pembangunan Wilayah Kalimantan.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu di Wilayah Kalimantan yaitu:

- (i) Pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan;
- (ii) Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya;
- (iii) Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir;
- (iii) Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin;
- (iv) Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai sebagai alur pelayaran; dan
- (v) Perlindungan IKN dari banjir kala ulang 100 tahun.

Kerangka Implementasi Transformasi

A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Kebijakan sarana dan prasarana dasar juga diarahkan untuk:

- i. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi /ekosistem di Wilayah Kalimantan;
- ii. Penuntasan RDTR kabupaten/ kota serta kewenangan tata ruang laut;
- iii. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
- iv. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Kalimantan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep Economic Hub tiga kota di Kalimantan Timur (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Samarinda, serta Pelabuhan Kijing (Kalimantan Barat), yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional);
- v. Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 di sisi wilayah Kalimantan bagian barat dan ALKI I1 di sisi wilayah Kalimantan bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu;
- vi. Pengembangan bandara utama (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan dan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk aerocity) serta pengembangan bandara perairan dan seaplane (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi):

- vii. Pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan terutama pada koridor perbatasan antarnegara, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Kalimantan;
- viii. Pengembangan moda kereta api untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota selaras dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah;
- ix. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi;
- x. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan serta kota-kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya, seperti Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak dan kota-kota lainnya; dan
- xi. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri terutama melalui pemanfaatan energi hidro seperti Sungai Kayan.

Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dilakukan melalui:

- i. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
- ii. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air;
- iii. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana;
 - a. Pembangunan permukiman dan hunian vertikal yang kompak, layak, dan terhubung dengan infrastruktur strategis;
 - b. Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hili dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST untuk menciptakan ekonomi sirkuler dengan fasilitas terintegrasi seperti wastehub atau neksus; dan
 - c. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.

B. Kestinambungan Pembangunan

Arah kebijakan kestinambungan pembangunan di Wilayah Kalimantan yaitu,

- i. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
- ii. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
- iii. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
- iv. Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;
- v. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; dan
- vi. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Strategi Pembangunan di Sektor Perhubungan Darat Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan di sektor transportasi untuk skala nasional ialah sebagai berikut:

- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan untuk menghubungkan wilayah produksi, distribusi, serta mendukung kawasan strategis seperti Ibu Kota Nusantara.
- Modernisasi angkutan umum yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau (termasuk sistem angkutan massal).
- Perbaikan infrastruktur keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, serta penegakan aturan lalu lintas.
- Efisiensi distribusi barang melalui pengembangan jaringan logistik darat yang terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan industri.
- Penerapan teknologi (ITS) dan pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk mendukung sistem yang modern dan berkelanjutan.

3.1.2. Telaahan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengatasi isu strategis ialah sebagai berikut:

Misi 1: Pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia.

1. Meningkatkan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
2. Meningkatkan upaya penuntasan stunting.
3. Meningkatkan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer dan lanjutan, dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi.
6. Meningkatkan budaya berolahraga masyarakat dan prestasi olahraga.

7. Meningkatkan ketahanan dan diversifikasi pangan, serta pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya.
8. Menerapkan Wajib sekolah 12 tahun.
9. Meningkatkan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah.
10. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif secara mersta.
11. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan Tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.
12. Meningkatkan kualitas lulusan yang terserap pasar kerja atau berwirausaha.
13. Meningkatkan gerakan gemar membaca dan literasi sekolah.
14. Meningkatkan kompetensi digital SDM.
15. Meningkatnya ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
16. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan.
17. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
18. Meningkatkan pemberdayaan serta penguatan kapasitas dan kemandirian pemuda.
19. Meningkatkan penanganan penyandang disabilitas dan perannya dalam pembangunan.
20. Meningkatkan kerukunan antar etnis dan antar umat beragama.
21. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.
22. Meningkatkan kapasitas Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan.
23. Meningkatkan perlindungan dan pembinaan SDM, lembaga, dan pranata adat.
24. Meningkatkan penerapan nilai-nilai luhur budaya lokal dalam pendidikan karakter khususnya generasi muda.
25. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan.
26. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional.
27. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah.
28. Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
29. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada.
30. Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan.
31. Meningkatkan etika dan budaya politik.
32. Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal termasuk rumah tangga miskin.
33. Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan pada daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.
34. Meningkatkan pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan.
35. Meningkatkan pemenuhan SPM sosial.
36. Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial.
37. Meningkatkan cakupan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan.

Misi 2: Pembangunan Infrastruktur yang Handal

1. Meningkatkan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah

2. Meningkatkan penyediaan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
3. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau ke seluruh wilayah.
4. Meningkatkan pasokan dan kualitas layanan listrik.
5. Percepatan penyelesaian jalan-jalan penghubung antar kawasan dan percepatan pembangunan jaringan jalur kereta api serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
6. Meningkatkan koordinasi pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan Banjarmasin serta kota-kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya.
7. Mewujudkan sistem transportasi yang aman dan andal bagi pengguna serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.
8. Meningkatkan koordinasi pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah.
9. Meningkatkan koordinasi pengembangan pelabuhanpelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik).
10. Meningkatkan koordinasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sisi Timur wilayah Kalimantan Selatan secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu.
11. Mengembangkan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
12. Meningkatkan penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
13. Meningkatkan penanganan permukiman kumuh.
14. Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama di daerah kepulauan dan afirmasi.
15. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan Berkelanjutan.

Misi 3: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah

1. Mengembangkan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan Selatan melalui hilirisasi komoditi unggulan
2. Meningkatkan hilirisasi industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia.
3. Mengembangkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
5. Mengembangkan pariwisata unggulan termasuk Geopark Meratus, dan ekonomi kreatif
6. Meningkatkan produktivitas BUMD
7. Meningkatkan pengendalian inflasi daerah.

8. Pembangunan irigasi baru terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.
9. Pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan.
10. Optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan hutan melalui perhutanan sosial dalam rangka peningkatan ekonomi di dalam dan di sekitar hutan.
11. Mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
12. Mengembangkan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian (dalam arti luas) dan kompleksitas industri
13. Mengembangkan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani.
14. Meningkatkan penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung sistem ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, dan pengembalian material ke dalam siklus produksi.
15. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif.
16. Meningkatkan rantai nilai domestik Kalimantan Selatan untuk mendukung rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional.
17. Mengembangkan infrastruktur berkualitas untuk daerah potensial investasi.
18. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work.
19. Meningkatkan penempatan tenaga kerja.
20. Meningkatkan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
21. Meningkatkan kualitas lulusan yang terserap pasar kerja atau berwirausaha.
22. Meningkatkan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
23. Meningkatkan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
24. Meningkatkan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan.

Misi 4: Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

1. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis termasuk lahan pasca tambang, ruang terbuka hijau, serta penghambatan laju deforestasi sekaligus untuk mendukung program pusat untuk Pengendalian Kerusakan Lahan.
2. Meningkatkan pelestarian geosites di kawasan Pegunungan Meratus
3. Meningkatkan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal sekaligus untuk mendukung program pusat untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
4. Menurunkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sekaligus mendukung 6 program pusat untuk Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Pengendalian Kerusakan Lahan,

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

5. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana sekaligus mendukung program pusat untuk Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut.
6. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir sekaligus mendukung program pusat untuk Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
7. Meningkatkan rehabilitasi ekosistem laut dan pesisir dengan penanaman bakau, terumbu karang buatan, dan pembinaan kelompok masyarakat pesisir sekaligus mendukung program pusat untuk Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.
8. Mengembangkan carbon tax dan carbon trading, program Just Energy Transition Partnership (JETP) serta transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM).
9. Mengembangkan interkoneksi antarwilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan.
10. Meningkatkan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.
11. Meningkatkan ketangguhan, sistem pendataan kebencanaan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat.
12. Mengembangkan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor.
13. Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai.
14. Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah.

Misi 5: Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah & Cepat

1. Meningkatkan penataan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.
3. Mengembangkan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah (smart ASN) dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Meningkatkan kualitas pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan termasuk penerapan manajemen risiko.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan Selatan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

9. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
10. Mengembangkan pembiayaan inovatif.
11. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
12. Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu
13. Meningkatkan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
14. Meningkatkan tata kelola data pembangunan termasuk pengembangan jaringan informasi Geospasial Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan berkualitas, mendorong percepatan kebijakan Satu Peta dan Satu Data.
15. Meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat, termasuk kecepatan respon terhadap laporan masyarakat.
16. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana publik dan pemerintahan.

Tema Pembangunan yang diusung pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2027 adalah:

**“Penguatan Investasi dan Perekonomian Dengan
Infrastruktur Terintegrasi yang Berkualitas”**

Memasuki tahun kedua, pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan difokuskan pada pengembangan investasi. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi strategis karena wilayah berada pada simpul perdagangan regional dengan dukungan pelabuhan samudera, jaringan sungai, dankedekatan dengan IKN. Basis ekonomi daerah yang kuat di sektor pertambangan, pertanian, perdagangan dan perindustrian memberikan fondasi bagi pengembangan hilirisasi, khususnya pengolahan mineral nonlogam, oleokimia, dan produk pertanian dan perikanan bernilai tambah. Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan mulai diarahkan menuju hilirisasi dan produksi berkelanjutan, sejalan dengan semangat ekonomi hijau dan rendah emisi. Pembangunan diarahkan untuk mendorong diversifikasi menuju sektor ramah lingkungan seperti energi baru terbarukan, pariwisata berbasis alam dan budaya, dan digitalisasi layanan.

Pengembangan konektivitas antarwilayah menjadi faktor pendorong iklim investasi yang mendorong berkembangnya perekonomian daerah. Tahun ini juga menitikberatkan pada mengembangkan hub logistik berbasis darat, sungai, dan pelabuhan yang menghubungkan wilayah Hulu–Tengah–Hilir Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur (IKN), sehingga memperkuat peran provinsi sebagai koridor logistik regional.

Tema tersebut dijabarkan melalui beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Memperkuat Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.
2. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur yang Handal.
3. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah.
4. Memantapkan Pembangunan Rendah Karbon dan Memperkuat Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana.

5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Arah kebijakan Provinsi dalam perencanaan pembangunan provinsi untuk Kabupaten Banjar tahun 2027, antara lain:

a) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian.

- Pengembangan Kawasan Perkotaan Martapura sebagai bagian dari kawasan inti WM Banjarbakula sebagai pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, dan sebagai kawasan ekonomi penyangga Banjarmasin–Banjarbaru–Martapura (Banjarbakula) didukung dengan infrastruktur transportasi publik, layanan dasar dan infrastruktur perdesaan.
- Pengembangan “Sentra Pangan Lestari”, dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat produksi pertanian, intervensi cetak sawah, dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan alih fungsi lahan pertanian.
- Penguatan swasembada pangan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Agrominapolitan Banjar yaitu pengembangan pertanian terpadu (padi–ikan–ternak) khususnya di lahan rawa dan pembentukan kawasan pangan strategis dan sentra agribisnis yang didukung pembangunan jalan pertanian, pasar desa, cold storage, dan pelabuhan sungai.
- Hilirisasi produk unggulan daerah melalui penguatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan: beras kemasan, tepung ikan dan makanan olahan serta penyiapan infrastruktur rumah kemas, sertifikasi halal, dan branding produk lokal.
- Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif meliputi: 1) pendampingan usaha mikro melalui inkubasi bisnis, koperasi, dan digitalisasi; 2) promosi produk unggulan Banjar melalui festival, e-commerce, dan kemitraan pasar modern; dan 3) pengembangan kerjasama dan promosi pusat batu mulia Martapura.
- Penguatan sektor pariwisata dengan mengembangkan UNESCO Global Geopark Meratus (Situs Rute Barat, Selatan dan Timur) diantaranya pada situs Pasar Terapung Lok Baintan, Tahura Sultan Adam, dan Gunung Api Purba Bawah Laut dengan didukung peningkatan amenities pariwisata, fasilitasi usaha pariwisata rakyat, dan pelatihan pemandu wisata lokal.

b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:

- Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan untuk peningkatan keterampilan petani, nelayan, dan pelaku usaha.
- Pusat pelatihan pertanian dan pengolahan pangan.

c) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana

- Restorasi lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi DAS, dan pembangunan pertanian berbasis ekosistem rawa.
- Pembangunan sistem mitigasi dan pengendali banjir.
- Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri.
- Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif.
- Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG'S)

Kewajiban Daerah lainnya didalam perencanaan pembangunan adalah mempertimbangkan pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goals*). *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan capaian yang terukur dalam tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah SDG's Kabupaten Banjar. Perangkat Daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan mendukung pencapaian SDG's. 17 Tujuan SDG's adalah:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan
mencanangkan pertanian berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia.
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
- 6) Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan.
- 7) Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern.
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- 10) Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara.
- 11) Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

- 14) Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
- 16) Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3.1.3 Telaah Terhadap Kebijakan Kabupaten Banjar

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar disusun dengan memperhatikan Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan isu-isu strategis ditingkat lokal, serta dalam upaya memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis di daerah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Banjar berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut:

a) Daya saing, inklusivitas dan karakter sumber daya manusia belum merata.

- Sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai.
- Kompetensi dan kualifikasi pendidik yang masih belum optimal.
- Sebaran pendidik yang belum merata.
- Pelaksanaan pendidikan kesetaraan masih kurang optimal.
- Partisipasi pada pendidikan tinggi masih rendah.
- Literasi masyarakat masih rendah.
- Penerapan beberapa SPM pendidikan belum memenuhi standar.
- Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang Memadai.
- Dukungan sarana dan prasarana bagi siswa difabel dan berkebutuhan khusus belum optimal.
- Pendidikan karakter yang belum matang untuk siswa.
- Partisipasi pada pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih rendah.
- Akses Pelayanan Kesehatan Belum Optimal.
- Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar dan pemerataan tenaga kesehatan masih belum optimal.
- Masih tingginya kasus ibu dan bayi dengan penyakit kronis dan infeksi.
- Kurangnya Asupan Makanan.
- Kompetensi SDM yang Relatif Masih Rendah.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS.
- Penyakit Menular (PM) cenderung masih tinggi.

- Penyakit Tidak Menular (PTM) cenderung masih tinggi.
 - Validasi dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial masih belum Optimal.
 - Belum optimalnya pengelolaan bantuan sosial dan pemberdayaan Masyarakat.
 - Kebijakan ramah penyandang disabilitas belum optimal.
 - Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Masih tingginya perkawinan anak.
 - Kasus penggunaan narkoba dan kenakalan remaja yang tinggi.
- b) Inklusivitas ekonomi berbasis sektor pertanian, perikanan dan pariwisata belum optimal.
- Diskontinuitas ketersediaan bahan baku.
 - Kualitas Sumber daya Manusia masih rendah.
 - Pemanfaatan teknologi industri belum optimal.
 - Masih rendahnya Daya saing produk.
 - Belum memadainya infrastruktur pendukung sektor pertanian dan perikanan.
 - Akses permodalan terbatas.
 - Koordinasi investasi belum optimal.
 - Promosi investasi belum memadai.
 - Iklim investasi yang belum kondusif.
 - SDM petani dan penyuluh masih kurang.
 - Masih kurangnya sarana prasarana pertanian.
 - Belum Optimalnya Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit.
 - Ketersediaan pakan ternak belum memadai dan harga pakan tinggi.
 - Harga pakan ikan tinggi.
 - Metode pengolahan pasca panen belum memadai.
 - Kurangnya daya tarik pariwisata.
 - belum memadainya infrastruktur pendukung pariwisata.
 - kemudahan akses transportasi belum memadai.
 - Promosi wisata kurang optimal.
 - Belum optimalnya daya saing dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - Pendataan jumlah kunjungan wisata belum optimal.
- c) Adanya Potensi Penurunan Kualitas lingkungan hidup.
- Pencemaran sumber air.
 - Pencemaran oleh aktivitas tambang.
 - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (jamban terapung).
 - Pengelolaan Aliran air lindi dari TPA.
 - Berkurangnya tutupan lahan di daerah hulu.

- Pendangkalan sungai.
- Alih fungsi tutupan lahan vegetasi / penghijauan menjadi lahan terbangun.
- Alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi lahan terbangun.
- Polusi kendaraan.
- Kebakaran hutan dan lahan.
- Kurangnya pemilahan persampahan.
- Pengelolaan limbah B3.
- Belum optimalnya penanganan persampahan.
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang sampah.
- Semakin meluasnya ekspansi jaringan pengelolaan sampah diikuti dengan semakin besarnya sumber daya yang diperlukan.

d) Belum Meratanya infrastruktur wilayah.

- Belum optimalnya penyediaan air minum masyarakat.
- Belum Optimalnya Penyediaan Layanan air limbah.
- Belum Optimalnya Sarana Drainase.
- Menurunnya kualitas jalan dan jembatan.
- Belum terhubungnya pusat-pusat kegiatan dengan jaringan jalan.
- Belum terpenuhinya transportasi masal yang terintegrasi.
- Belum optimalnya pelayanan publik yang terintegrasi.
- Belum meratanya pembangunan Desa.
- Masih adanya kawasan kumuh.
- Pemukiman penduduk belum tertata dengan baik.
- Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pengendalian dini pencegahan kebakaran.
- Belum optimalnya profesionalitas aparat DPKP dan kurangnya SDM yang kompeten.
- Rendahnya capaian *respon time* (SPM).
- Kondisi sarpras pemadaman dan penyelamatan tidak memadai (SPM).
- Belum optimalnya hidran umum di kota.
- Belum ada penetapan regulasi mengenai kebakaran.
- Belum terpenuhinya rasio petugas pemadam kebakaran.
- Jumlah redkar belum optimal (SPM).
- Kurangnya akses perumahan layak huni.
- Belum terpenuhinya akses Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan permukiman.
- Belum meratanya jalan lingkungan.
- Belum terfasilitasinya warga yang permukimannya terdampak akibat kebijakan pemerintah, bencana alam ataupun bencana sosial.

e) Belum Optimalnya Tata kelola pemerintahan yang adaptif berbasis digital.

- Sistem Merit belum optimal.
- Kompetensi ASN yang masih rendah.
- Pelayanan Kepegawaian belum optimal.
- Digitalisasi untuk pelayanan pemerintah belum merata.
- Jangkauan infrastruktur dan SDM IT yang belum optimal.
- Lemahnya Tata kelola SPBE.
- Keamanan Layanan yang belum optimal.
- Jangkauan infrastruktur belum optimal.
- SDM IT yang belum optimal.
- Belum Optimalnya Perencanaan SPBE.
- Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Potensi pendapatan daerah menurun.
- Belum optimalnya pengelolaan BUMD.
- Penyederhanaan Struktur Organisasi belum optimal.

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis yang memiliki aspek politik dan teknokratik. Pelaksanaan program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah. Dalam dimensi politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan. Secara operasional, janji politik tersebut telah dikanalisis ke dalam nomenklatur program yang sesuai dengan regulasi guna mempermudah diimplementasikan oleh Perangkat Daerah terkait. Sementara itu, dalam dimensi teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis

terhadap isu serta permasalahan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki relevansi yang tinggi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Berikut merupakan program prioritas yang merupakan hasil kanalisasi dari program prioritas kepala daerah dari hasil cascading kinerja yang telah dilakukan.

PRIORITAS 1

BANJAR SIGAR

Banjar Sigar merupakan program prioritas yang menasar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar. Berbagai intervensi yang menasar peningkatan layanan dan infrastruktur dalam pelayanan kesehatan menjadi upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar, dengan rincian program:

1. Bantuan asupan makan bergizi bagi bayi/ anak untuk memastikan kesehatan tumbuh kembang anak/bayi.
2. Sehat cepat, memberikan layanan kesehatan cepat melalui layanan hotline dan mendatangi ke rumah.
3. Merevitalisasi rumah sakit dan membangun rumah sakit baru.
4. Layanan kesehatan bagi warga kurang mampu.
5. Puskesmas melayani yakni memiliki prasarana dan sarana kesehatan yang memadai.
6. Posyandu masa depan sebagai pusat pendidikan dan kesehatan keluarga dilengkapi fasilitas ramah anak dan fasilitas kesehatan yang cukup.
7. Pemerataan rasio tenaga kesehatan di desa, khususnya bidan desa di tempat terpencil dengan mengutamakan tenaga kesehatan lokal desa.

PRIORITAS 2

BANJAR CENDEKIA

Banjar Cendekia adalah program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Banjar. Program prioritas Banjar Cendekia menekankan pada berbagai intervensi dalam bidang pendidikan melalui peningkatan kualitas pengajar, infrastruktur, dan bantuan operasional baik kepada sekolah formal maupun sekolah keagamaan di Kabupaten Banjar, dengan rincian program :

1. Pesantren dapat menerima bantuan untuk kegiatan operasional pesantren dan pendidikan santri.
2. Sekolah layak, yakni revitalisasi dan pembangunan sekolah, dan ruang kelas dengan prasarana dan sarana yang memadai.
3. Sekolah gratis bagi warga yang membutuhkan.
4. Belajar berpikir dan berekspresi, yaitu belajar sesuai dengan minat dan bakat.
5. Tuan guru/ guru mengaji masuk sekolah untuk menguatkan pendidikan agama, dan penguatan nilai-nilai akhlak mulia.
6. Alumni Pesantren dapat menerima bantuan untuk kegiatan penyetaraan pendidikan.
7. Pemberian insentif/tunjangan bagi tuan guru/ guru mengaji.
8. Pemerataan rasio guru dan murid.
9. Memberikan tunjangan yang berkeadilan dan/ insentif bagi guru sesuai dengan prestasi dan pencapaian kinerja.
10. Satu Pesantren Satu Produk, yakni pesantren dapat memiliki kemandirian ekonomi melalui perdagangan dan jasa.

PRIORITAS 3

BANJAR SAMAWA

Banjar Samawa merupakan program prioritas yang menasar peningkatan kualitas keluarga Kabupaten Banjar. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam

kemasyarakatan memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya pembangunan manusia ke depan. Banjar Samawa menekankan intervensi kepada penguatan keluarga sebagai institusi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, dengan rincian program:

1. Penguatan keluarga sebagai basis pendidikan moral, yakni mengadakan kelas parenting dan konseling keluarga untuk membantu orang tua dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral yang kuat.
2. Sekolah muslimat, yakni memberikan pelatihan kepada kaum perempuan agar memahami hak dan kewajiban perempuan, pendidikan anak, dan pendidikan keluarga.
3. Muslimat terampil, yakni memberikan keterampilan bagi perempuan sehingga mampu berdaya sebagai ketahanan keluarga.
4. Penambahan fasilitas ramah anak, khususnya di tempat ibadah.

PRIORITAS 4

BANJAR BERKARAKTER

Banjar Berkarakter adalah program prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pembangunan kebudayaan Kabupaten Banjar secara menyeluruh. Program prioritas ini menekankan kepada pembangunan kebudayaan sebagai landasan hidup yang kokoh dalam masyarakat Kabupaten Banjar untuk menciptakan keharmonisan sosial antar elemen masyarakat di Kabupaten Banjar, dengan rincian program :

1. Festival budaya untuk mempromosikan dan melestarikan budaya, khususnya Budaya Banjar yang religius menjadi daya tarik wisata.
2. Budaya dari sekolah, yakni pengenalan dan pengembangan.
3. Kebudayaan Banjar melalui program-program di sekolah.
4. Pendidikan etika dan moral religius, yakni mengadakan pendidikan yang fokus pada ajaran etika dari berbagai agama dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
5. Gerakan kesadaran sosial, yakni mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sukarela seperti membersihkan lingkungan, membantu yang membutuhkan, anti-Kekerasan dan anti-Perundungan.

PRIORITAS 5

BANJAR INTAN MAJU

Banjar Intan Maju merupakan program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi sektor unggulan Kabupaten Banjar. Dalam dokumen RPJPD ditetapkan bahwa sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian sebagai tiga sektor unggulan daerah yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Banjar Intan Maju merumuskan berbagai intervensi untuk mendukung pencapaian tujuan ini, melalui penyediaan sarana dan prasarana di ketiga sektor tersebut, perluasan akses pasar, dan

peningkatan produktivitas sektor-sektor tersebut secara lebih lanjut, dengan rincian program:

1. Peningkatan Destinasi wisata unggulan, yakni pengembangan destinasi wisata unggulan yang mampu memberikan nilai tambah pada perekonomian daerah dengan dukungan infrastruktur, promosi dan event keagamaan.
2. Wisata Perikanan, yakni mendorong pengembangan kampung nelayan dan kampung perikanan sebagai destinasi wisata potensial.
3. Bantuan Benih, Pakan, dan Obat, yakni upaya peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dengan menyalurkan bantuan kepada pembudidaya, berupa benih, pakan, dan obat-obatan.
4. Bantuan Peralatan, yakni upaya peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dengan menyalurkan bantuan kepada nelayan dan pembudidaya serta pengolah ikan, berupa mesin dan peralatan.
5. Pembangunan Coldstorage, yakni upaya pengendalian harga dan melindungi risiko kerusakan hasil panen, serta jaminan ketersediaan pangan diperlukan Pembangunan coldstorage.
6. Pembangunan Gudang Logistik, yakni upaya pengendalian harga dan melindungi risiko kerusakan hasil panen, serta jaminan ketersediaan pangan diperlukan pembangunan gudang logistic, berupa lumbung desa hingga gudang logistik pangan.
7. Bantuan Peralatan, yaitu upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan menyalurkan bantuan kepada petani, berupa peralatan pertanian.
8. Bantuan Bibit, Pupuk, dan Obat, yaitu upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan menyalurkan bantuan kepada petani, berupa benih/ bibit, pupuk, dan obat-obatan.
9. Revitalisasi Lahan Pertanian, yakni upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan melakukan perluasan dan revitalisasi lahan pertanian.
10. Kindai limpuar, yakni peningkatan produksi dan produktivitas padi dengan menjadikan lahan pertanian tanaman pangan menjadi kawasan prioritas yang didukung infrastruktur memadai.
11. Revitalisasi/ Pembangunan Saluran Irigasi, yaitu upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan melakukan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi pertanian.

PRIORITAS 6

BANJAR MEMBANGUN

Banjar Membangun merupakan program prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur daerah dalam rangka mendukung upaya pembangunan secara umum. Intervensi dalam program prioritas ini memfokuskan kepada pembangunan jalan, jembatan, dan optimalisasi transportasi publik di Kabupaten Banjar, dengan rincian program:

1. Peningkatan Jalan dan jembatan mantap, yakni akselerasi dalam pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan, baik jalan kabupaten maupun jalan desa dengan sumber pembiayaan dari multi-stakeholder, termasuk bantuan pembiayaan khusus jalan kabupaten.
2. Pengembangan angkutan massal yang nyaman dan aman.

PRIORITAS 7

BANJAR TERTATA

Banjar Tertata adalah program prioritas daerah dalam rangka penataan ruang daerah yang lebih baik. Ruang sebagai bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Oleh karenanya, peningkatan kualitas ruang yang berkeadilan untuk semua menjadi hal yang penting untuk dilakukan, dengan rincian program:

1. Alun-alun dan Koridor, yaitu melanjutkan penataan alun-alun dan koridor kota martapura melalui pembiayaan dari multy stakeholder termasuk dari badan usaha/usaha swasta yang ingin berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
2. Kawasan Religi, yakni melanjutkan penataan kawasan religi sebagai identitas kota yang religius melalui pembiayaan dari multi stakeholder.
3. Smart City, yaitu penerapan konsep kota cerdas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan angka literasi digital.
4. Kota Ramah Difabel, dengan memastikan bahwa kota adalah kota untuk semua sehingga pembangunan infrastruktur bias diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).
5. Penataan ruang berkeadilan dan pengelolaan kawasan kumuh yang terpadu.

PRIORITAS 8

SMART KAMPUNG MANIS

Smart Kampung Manis ialah program unggulan daerah dalam rangka pembangunan desa yang lebih berdaya dan mandiri. Desa yang berdaya menjadi faktor yang penting dalam pembangunan daerah secara umum. Sebagai unit pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat secara intensif, pemerintah desa perlu memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan baik pemerintah maupun masyarakat desa menjadi penting, dengan rincian program:

1. Kesejahteraan Perangkat Desa, yakni memberikan bantuan tambahan keuangan bagi perangkat desa sebagai insentif dalam upaya peningkatan pelayanan di desa.
2. BUMDesa Berkarya, yaitu memastikan bahwa BUMdesa di wilayah Kabupaten Banjar mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian desa, berupa PADesa dan menciptakan lapangan pekerjaan mandiri di desa.

3. Internet Desa, yakni memastikan bahwa seluruh desa di wilayah Kabupaten Banjar telah dijangkau akses internet, dalam upaya pemerataan dan penyebaran informasi.
4. Satu Desa Satu Produk, yakni memberikan bantuan teknis dalam upaya pengembangan ekonomi desa dengan mengembangkan produk lokal desa setempat untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

PRIORITAS 9

BANJAR BAUSAHA

Banjar Bausaha merupakan program prioritas daerah dalam rangka mendorong kewirausahaan dan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif di Kabupaten Banjar. Program prioritas ini didukung oleh intervensi dalam pengembangan kewirausahaan melalui UMKM serta peningkatan kapasitas tenaga kerja daerah, dengan rincian program:

1. Dukungan untuk UMKM, yakni memberikan bantuan teknis, pelatihan, akses ke pembiayaan, dan penyederhanaan regulasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
2. Diversifikasi Ekonomi, yakni mengembangkan berbagai sektor ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor.
3. Pengembangan Wirausaha, yakni mendorong budaya kewirausahaan melalui pendidikan, pelatihan, dan program mentor untuk membantu individu memulai dan mengembangkan usaha serta memfasilitasi akses ke pembiayaan bagi wirausaha melalui pinjaman mikro, modal ventura, dan skema pendanaan lainnya.
4. Pelatihan dan Magang, yaitu menyediakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja untuk memastikan lulusan siap kerja dan fasilitasi program magang untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja, khususnya di sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja terampil.

PRIORITAS 10

BANJAR TANGGUH

Banjar Tangguh adalah program prioritas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Peningkatan ketahanan daerah ini didukung oleh penguatan mitigasi bencana dan infrastruktur pendukung dalam penanggulangan bencana, dengan rincian program:

1. Jejaring Crisis Center, Menyediakan bantuan darurat dan dukungan dalam situasi krisis.
2. Pendidikan Kebencanaan, Memberikan pendidikan ke- Bencana-an disekolah baik pada upaya pencegahan maupun penanggulangan bencana.

3. Infrastruktur Pengendali Banjir, Menyediakan serangkaian fasilitas dan sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengurangi dampak banjir.

PRIORITAS 11

BANJAR LESTARI

Banjar Lestari merupakan program prioritas daerah dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah secara berkelanjutan. Program prioritas ini memuat intervensi dalam pengelolaan air dan limbah yang memadai serta pengelolaan sampah yang partisipatif, dengan rincian program:

1. Air dan Limbah Layak, yaitu melanjutkan perbaikan dan pencapaian akses layanan air bersih layak dan akses air limbah yang layak.
2. Sampah Komunitas, yaitu melanjutkan penatakelolaan sampah berbasis individual dan komunitas untuk mengurangi produksi sampah di masyarakat melalui inovasi dan integrasi pengelolaan sampah.
3. Sampah Sekolah, yaitu mendorong pembentukan pendidikan mengenai sampah dan pengelolaan sampah yang mendasar dan dapat diterapkan secara nyata di sekolah.

PRIORITAS 12

BANJAR AMANAH

Banjar Amanah adalah program prioritas daerah yang menasar pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, dan berdampak. Pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel merupakan kunci penting dalam mendukung penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan APBD yang efektif juga akan meningkatkan keberdampakan dari penggunaan anggaran daerah. Program prioritas ini didukung oleh berbagai intervensi untuk memastikan APBD yang lebih transparan dan berdampak, dengan rincian program:

1. APBD untuk Infrastruktur dan Pembangunan Manusia, yaitu penggunaan APBD difokuskan pada pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.
2. APBD untuk Membangun Desa, yaitu pemanfaatan APBD untuk membangun desa melalui ADD (Alokasi Dana Desa) sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. KPBU, yakni membangun kemitraan Pemerintah – Swasta untuk memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
4. BUMD untuk PAD, yakni reformasi BUMD dengan menerapkan GCG (Good Corporate Governance) dan perusahaan yang efektif dan efisien guna meningkatnya PAD melalui BUMD.
5. Optimalisasi Aset, yakni mengusahakan aset untuk aktivitas ekonomi sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah.

6. Kemitraan BUMD dengan Badan Usaha Swasta, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi usaha BUMD melalui pengembangan kerjasama dengan Badan Usaha Swasta guna meningkatkan perekonomian daerah.

PRIORITAS 13

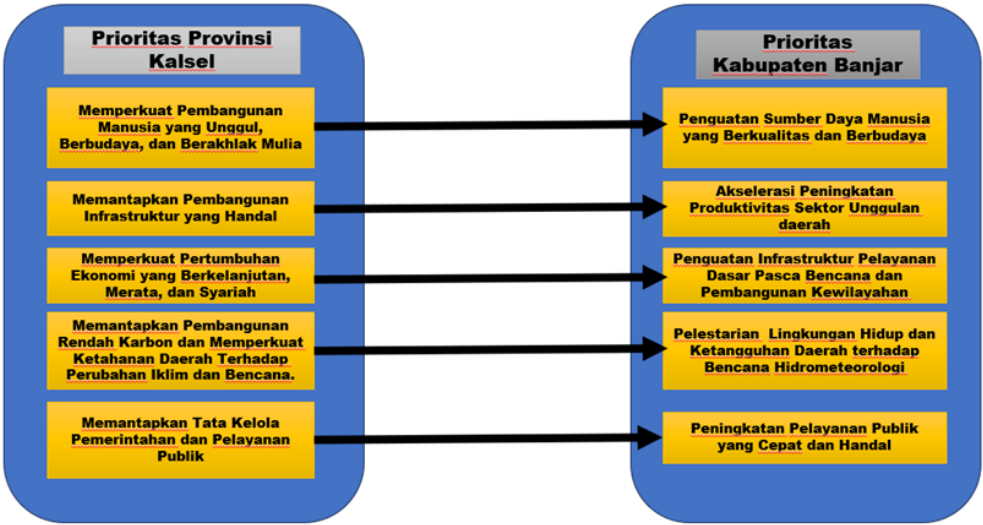
BANJAR MELAYANI

Banjar Melayani merupakan program prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Banjar kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, mulai dari penataan aparatur sipil yang efektif, digitalisasi layanan publik, dan pemerataan akses pelayanan publik secara umum, dengan rincian program:

1. Pelayanan Publik yang Handal, yakni percepatan pembangunan pelayanan publik yang terintegrasi dan mampu langsung menjangkau kebutuhan masyarakat.
2. Manajemen ASN, yaitu percepatan penerapan Sistem Merit, yakni manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi
3. Renumerasi Adil Berbasis Kinerja dan Risiko, yakni percepatan renumerasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adil berbasis kinerja dan manajemen risiko kecurangan untuk membentuk ASN yang bersih dan melayani.
4. Tata Kelola Berbasis Elektronik, yakni mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani
5. APBD Elektronik, yakni pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi, serta pengawasan APBD
6. Satu Data, yaitu pembangunan satu data yang handal terkait tata kelola pemerintahan guna memberikan informasi akurat yang dapat diakses langsung oleh masyarakat
7. Pelayanan Publik yang Handal, yakni percepatan pembangunan pelayanan publik yang terintegrasi dan mampu langsung menjangkau kebutuhan masyarakat.

Sinkronisasi antara Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah (Kabupaten Banjar) dapat dilihat pada Bagan berikut:

SINKRONISASI ANTARA PRIORITAS PROVINSI DAN PRIORITAS DAERAH



Dari uraian pada telaahan kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan provinsi dan telaahan terhadap kebijakan daerah yang telah dijelaskan di atas, dan dengan berpedoman pada urusan serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, maka terhadap prioritas nasional, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mendukung ke prioritas nomor 5 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan dengan Major Project Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Terhadap prioritas provinsi yaitu Aspek Memantapkan Pembangunan Infrastruktur yang Handal. Sedangkan untuk prioritas daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mendukung pencapaian prioritas daerah nomor 3 yaitu Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Pasca bencana dan Pembangunan Kewilayahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, tentu tidak terlepas dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjar. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran dan renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar harus sejalan dengan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mendukung sasaran Kabupaten Banjar dalam hal

"Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan". Sasaran tersebut sekaligus menjadi tujuan di Renstra Dinas Perhubungan untuk tahun 2025-2029, hal ini diperoleh dari hasil telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Banjar dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dan sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar pada urusan perhubungan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai, dalam rumusan yang lebih spesifik dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Berhubungan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, juga perlu menelaah aturan-aturan terkait perhubungan yang dapat digunakan dalam perumusan sasaran, sebagaimana termuat dalam **Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)**, dimana tujuan Sistem Transportasi Nasional ialah **"Terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan internasional."**

Dengan melihat penjelasan tersebut di atas maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas". Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas

Indikator ini merupakan representasi dari Keterjangkauan daerah untuk mencapai moda transportasi darat dan sungai.

Adapun untuk target ditetapkan berdasarkan formulasi perhitungan yang telah disepakati bersama dengan berpedoman pada sumber data yang valid yang keseluruhnya dapat dilihat dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar periode 2025-2029.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar periode 2025-2029, dan ini juga berarti merupakan tujuan dan sasaran untuk Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027. Karena Ranwal Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027 adalah tahapan ketiga dari tahapan-tahapan penyusunan dokumen Renja 2025 dan ini merupakan *breakdown* dari perencanaan tahunan untuk periode Renstra Dinas Perhubungan periode 2021-2026, tepatnya tahun ketiga untuk perencanaan tahunan.

Tujuan dan sasaran beserta indikator dan target dari Rankhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2027, selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2027

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja/Sasaran Tahun 2027
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Inklusif	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)			3,48
		Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	65
			Rasio Konektivitas	0,63
			Tingkat Keselamatan	99,52
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,3

Sumber Data: Renstra Dinas Perhubungan Periode 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Prioritas

Dalam sub bagian ini akan dijelaskan terkait dengan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam Renja tahun 2027 dengan penjelasan sebagai berikut :

3.3.1. Faktor- Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih khususnya Misi 2: Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan, Tujuan 2.1: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, Sasaran 2. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah. Untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut maka ditentukan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagai rencana aksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sebagai rencana aksi dari Dinas Perhubungan untuk mendukung salah satu prioritas daerah yaitu Banjar Membangun “**Banjar Membangun merupakan program prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur daerah dalam rangka mendukung upaya pembangunan secara umum. Intervensi dalam program prioritas ini memfokuskan kepada**

pembangunan jalan, jembatan, dan optimalisasi transportasi publik di Kabupaten Banjar” dengan “Rincian Program Jalan dan jembatan mantap, yakni akselerasi dalam pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan, baik jalan kabupaten maupun jalan desa dengan sumber pembiayaan dari multi-stakeholder, termasuk bantuan pembiayaan khusus jalan kabupaten dan Pengembangan angkutan massal yang nyaman dan aman.”

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

Garis besar terkait program, kegiatan serta sub kegiatan prioritas pada Ranwal Renja Dinas Perhubungan 2027 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam perumusan program dan kegiatan pada Renja 2027 ini lebih ditekankan kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah, sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Secara garis besar usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan untuk tahun anggaran 2027 yang akan datang yaitu:

- 1) Jumlah program yang diusulkan sebanyak 3 program.
- 2) Jumlah kegiatan yang diusulkan sebanyak 19 kegiatan
- 3) Jumlah sub kegiatan yang diusulkan sebanyak 55 sub kegiatan
- 4) Total kebutuhan dana yaitu sebesar Rp 14.022.979.000,00 dari APBD .

Dari beberapa program dan kegiatan yang diusulkan tentunya terdapat beberapa penyesuaian terhadap ketidaksesuaian saat rancangan awal RKPD, baik untuk jenis program/kegiatan ataupun pagu indikatif.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2027 Kabupaten Banjar dengan sumber pendanaan seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3. 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2027

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Dinas Perhubungan							14.022.979.000,00			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.022.979.000,00				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						14.022.979.000,00				
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Ratio			Kab. Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa	0.364 Indeks				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan			Kab. Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa	81 Persen				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kawasan Parkir Tertib			Kab. Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa	100 Persen				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif			Kab. Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa	25 Persen				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terminal & halte yang sesuai standar			Kab. Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa	67 Persen				Dana Transfer Umum-Dana	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
													Alokasi Umum		
					2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik			Kab. Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa	55,45 Persen				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							Rp 8.911.314.400,00			
2	15	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Rp 67.242.558,00			
2	15	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	2 Dokumen	100 Persen	Rp 8.142.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	% Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	4 Dokumen	100 Persen	Rp 17.728.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	% Tersusunnya dokumen perencanaan,	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	90.25 Indeks	3 Laporan	100 Persen	Rp 10.668.558,00	Dana Transfer Umum-	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	4 Laporan	100 Persen	Rp 9.636.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	% Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	1 Dokumen	100 Persen	Rp 10.534.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	% Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	1 Data	100 Persen	Rp 10.534.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Rp 6.156.516.442,00		
2	15	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	% Terpenuhi Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	64 Orang/bulan	100 Persen	Rp 5.932.509.642,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	% Terpenuhi Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	12 Dokumen	100 Persen	Rp 214.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	% Terpenuhi Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	1 Laporan	100 Persen	Rp 9.446.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								Rp 8.752.000,00		
2	15	1	02:03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	% Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	12 Laporan	100 Persen	Rp 8.752.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Rp 143.991.000,00		
2	15	1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	90.25 Indeks	18 Orang	100 Persen	Rp 143.991.000,00	Dana Transfer Umum-	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Peraturan Perundang-Undangan	sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								Rp 401.117.000,00		
2	15	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	% Terasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	1 Paket	100 Persen	Rp 30.639.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	% Terasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	2 Paket	100 Persen	Rp 28.286.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	% Terasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	1 Paket	100 Persen	Rp 13.230.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	% Terasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	12 Laporan	100 Persen	Rp 3.370.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% Terasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	12 Laporan	100 Persen	Rp 325.592.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Rp 15.997.000,00			
2	15	1	02:07	5	Pengadaan Mebel										
					Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	% Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	10 Unit	100 Persen	Rp 14.901.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
					Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	% Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	10 Unit	100 Persen	Rp 1.096.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Rp 1.366.509.000,00			
2	15	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
					Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	12 Laporan	100 Persen	Rp 94.799.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					Indeks Kepatuhan dan Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Persentase jasa penunjang pelayanan umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	90.25 Indeks	12 Laporan	100 Persen	Rp 1.271.710.000,00	Dana Transfer Umum-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kantor yang terpenuhi	Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Rp 751.189.400,00			
2	15	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	% Terpenuhi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	1 Unit	100 Persen	Rp 42.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	% Terpenuhi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	30 Unit	100 Persen	Rp 622.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	% Terpenuhi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.25 Indeks	60 Unit	100 Persen	Rp 40.679.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Indeks Kepatuhan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	% Terpenuhi Pelayanan	Kab. Banjar, Semua	90.25 Indeks	1 Unit	100 Persen	Rp 45.080.000,00	Dana Transfer	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							Rp 5.111.664.600,00			
2	15	2	02:02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							Rp 417.950.250,00			
2	15	2	02:02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
						Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67 Persen	1 Unit	70 Persen	Rp 81.820.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	2	02:02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
						V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,364 Indeks	37 Unit	85 Persen	Rp 197.684.491,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	2	02:02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
						Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67 Persen	1 Unit	70 Persen	Rp 38.027.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	2	02:02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
						V/C Ratio Jalan di	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Persentase Perlengkapan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	0,364 Indeks	32 Unit	85 Persen	Rp 100.418.509,00	Dana Transfer Umum-	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Kabupaten Banjar		Jalan Yang Terpenuhi	Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum	
2	15	2	02:03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							Rp 125.976.750,00			
2	15	2	02:03	7	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)										
						Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67 Persen	1 Unit	80 Persen	Rp 80.620.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	2	02:03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)										
						Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terrehabilitasi dan terpelihara	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67 Persen	4 Unit	80 Persen	Rp 45.356.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	2	02:04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							Rp 78.591.000,00			
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
						Persentase Kawasan Parkir Tertib	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase juru parkir yang terbina	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	50 Persen	Rp 20.000.000,00		
2	15	2	02:04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Persentase Kawasan Parkir Tertib	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan titik Parkir	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	Rp 58.591.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	2	02:05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								Rp 682.312.000,00		
2	15	2	02:05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
						Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Persentase kualitas Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 Persen	1 Unit	100 Persen	Rp 66.973.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	2	02:05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor										
						Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 Persen	5400 Unit	100 Persen	Rp 366.143.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	2	02:05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
						Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 Persen	5200 Dokumen	100 Persen	Rp 150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	15	2	02:05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
					Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 Persen	1 Laporan	100 Persen	Rp 19.276.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	2	02:05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
					Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Persentase kualitas Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 Persen	13 Unit	100 Persen	Rp 79.920.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	2	02:06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							Rp 1.115.283.000,00			
2	15	2	02:06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota										
					V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,364 Persen	12 Laporan	100 Persen	Rp 699.992.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	2	02:06	14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
					V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,364 Persen	1 Dokumen	100 Persen	Rp 10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	2	02:06	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas										
					V/C Ratio Jalan di	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka	Persentase penerapan	Kab. Banjar, Semua	0,364 Persen	6 Dokumen	100 Persen	Rp 395.291.000,00	Dana Transfer		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
						Kabupaten Banjar	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	2	02:06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
						V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,364 Persen	1 Laporan	100 Persen	Rp 10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	2	02:07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								Rp 10.000.000,00			
2	15	2	02:07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin											
						V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,364 Persen	1 Laporan	77,5 Persen	Rp 10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								Rp 2.062.500.000,00			
2	15	2	02:08	7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
						Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Jumlah armada angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah angkutan umum yang tesedia dan beroperasi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Persen	25 Unit	100 Persen	Rp 2.062.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	2	02:14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								Rp 36.529.600,00			
2	15	2	02:14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Persentase Izin Trayek	Jumlah Laporan Koordinasi dan	Persentase angkutan umum	Kab. Banjar, Semua	25 Persen	1 Laporan	83.33 Persen	Rp 17.521.600,00	Dana Transfer		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Angkutan Umum Yang Aktif	Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	2	02:14	3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
					Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Persen	12 Unit	83.33 Persen	Rp 19.008.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							Rp 1.272.413.200,00			
2	15	3	02:03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha							Rp 37.541.500,00			
2	15	3	02:03	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
					Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56,45 Persen	1 Dokumen	2 Persen	Rp 18.185.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
							Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
2	15	3	02:03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56,45 Persen	1 Laporan	2 Persen	Rp 19.356.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	3	02:13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau							Rp 544.980.500,00			
2	15	3	02:13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau										
						Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56,45 Persen	1 Unit	61 Persen	Rp 5.523.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	3	02:13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56,45 Persen	2 Unit	61 Persen	Rp 539.457.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL													Rp 14.022.979.000,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, serta merujuk kepada hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dan 2025 sebagaimana dibahas sebelumnya, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dengan mempertimbangkan aspek seperti kondisi, permasalahan, dan isu strategis.

Secara garis besar Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2027 terdiri dari 3 program, 19 kegiatan, 58 Sub Kegiatan dengan total pendanaan sebesar Rp 14.022.979.000,00 yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Banjar, terdapat beberapa penyesuaian usulan program kegiatan serta pagu indikatifnya sebagaimana hasil formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang dilakukan melalui proses rapat kerja teknis.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027
dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Perhubungan						14.022.979.000,00						15.477.268.358,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.022.979.000,00							15.477.268.358,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						14.022.979.000,00							15.477.268.358,00	
1	2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	91,25 Indeks	89,75 Indeks	90,25 Indeks	90,5 Indeks	8.742.323.642,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas ,	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan		-	10.182.603.758,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kewilayahan				
	2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	67.242.558,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur	3. Penguatan infrastruktur	ASN	-	113.295.958,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Perangkat Daerah	dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu								ur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	pelayan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.142.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	18.142.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	17.728.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembang	ASN	-	28.728.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	unan kewilayahan				
	2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	10.668.558,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	18.668.558,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9.636.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	17.636.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
	2	15	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.534.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	DANA ALOK ASI UMU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	3. Penguatan infrastruktur	ASN	-	11.587.400,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Statistik Sektoral Daerah						Semua Kel/Desa	M (DAU)	ur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	pelayan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	10.534.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	18.534.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.156.516.442,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas ,	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan	ASN	-	7.077.990.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kewilayahan								
	2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	5.932.509.642,00	Kab. Banjar, Semua	DANA ALOK	Melanjutkan pengembangan	3. Penguatan	ASN	-	6.748.984.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Gaji dan Tunjangan ASN						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASU UMUM (DAU)	ngan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah				

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	214.560.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengemba	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	312.560.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															ngkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.446.800,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascaben	ASN	-	16.446.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Keuangan Akhir Tahun SKPD								lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	cana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	8.752.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	17.752.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.752.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	17.752.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

N o	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Tar get	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																kewirausah aan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	1	5	1	2.0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	143.991.000 ,00		Melanjutka n pengemba ngan infrastruk tur dan meningkat	3. Penguata n infrastruk tur pelayana n dasar	ASN	-	151.752.000 ,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong g kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	pascabencana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang			18 Orang	143.991.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	151.752.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Tar get	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
		2	1	5	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraa n penunjang administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	401.117.000 ,00		Melanjutka n pengemba ngan infrastrukt ur dan meningkat kan lapangan kerja yang berkualitas , mendoron g	3. Penguata n infrastruk tur pelayana n dasar pascaben cana dan pembang unan kewilaya han	ASN	-	489.117.000 ,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.639.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	3. Penguatan infrastruktur	ASN	-	38.639.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kantor yang Disediakan						Semua Kel/Desa	M (DAU)	ur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	pelayan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	28.286.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah	ASN	-	38.286.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.230.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembang	ASN	-	18.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	unan kewilayahan				
	2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.370.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	8.370.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	325.592.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	385.592.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Tar get	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														kewirausah aan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
	2	1	5	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	15.997.000, 00		Melanjutka n pengemba ngan infrastruk tur dan meningkat	3. Penguata n infrastruk tur pelayana n dasar	ASN	-	28.997.000, 00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														kan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong g kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	pascabencana dan pembangunan kewilayah an					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			10 Unit	14.901.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	21.901.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	1.096.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas ,	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan	ASN	-	7.096.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kewilayahan				
	2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.366.509.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur	3. Penguatan infrastruktur	ASN	-	1.473.509.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Pemerintahan Daerah									ur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	pelayan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	94.799.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	101.799.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.271.710.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembang	ASN	-	1.371.710.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	unan kewilayahan				
	2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	751.189.400,00			Melanjutkan pengembangan	3. Penguatan	ASN	-	830.190.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								ngan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42.750.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengemba	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	47.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															ngkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	30 Unit			30 Unit	622.680.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascaben	ASN	-	682.680.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Pajak dan Perizinannya								lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	cana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit			60 Unit	40.679.400,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	ASN	-	48.680.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
	2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	45.080.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas ,	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan	ASN	-	51.080.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kewilayahan				
2	2	15	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,355 Unit		0,368 Indeks	0,364 Indeks	5.111.664.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur	3. Penguatan infrastruktur	Masyarakat	-	4.697.142.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									ur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	pelayan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Jalan yang memiliki kelengkapan Sarana Prasarana dalam kondisi baik	85 Persen		65 Persen	70 Persen	81.820.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	442.950.250,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	81.820.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas ,	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan	Masyarakat	-	Rp 90.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kewilayahan								
	2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	41 Unit		30 Unit	37 Unit	197.684.491,00	Kab. Banjar, Semua	DANA ALOK	Melanjutkan pengembangan	3. Penguatan	Masyarakat	-	201.684.491,00	DINAS PERHUBUNGAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kabupaten/Kota yang Tersedia						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASUM (DAU)	ngan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah				

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan															
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	38.027.250,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengemba	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	43.027.250,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															ngkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	35 Unit		20 Unit	32 Unit	100.418.509,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascaben	Masyarakat	-	107.418.509,00	DINAS PERHUBUNGAN

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Tar get	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															lapangan kerja yang berkualitas , mendoron g kewirausah aan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	cana dan pembang unan kewilaya han				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Sarana Prasarana terminal yg sesuai standar	85 Persen	55 Persen	56,34 Persen	61 Persen	125.976.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	145.976.750,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.03	7	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)															
							Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	80.620.750,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	90.620.750,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang	6 Unit		5 Unit	4 Unit	45.356.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	3. Penguatan infrastruktur	Masyarakat	-	55.356.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							terehabilitasi dan terpelihara						Semua Kel/Desa	M (DAU)	ur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	pelayan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																peran aktif koperasi.					
		2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pengawasan Parkir	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	78.591.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	93.591.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.04	2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	1 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas ,	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan	Masyarakat	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kewilayahan				
	2	15	2	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Laporan Koordinasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp58.591.000,00	Kab. Banjar, Semua	DANA ALOK	Melanjutkan pengembangan	3. Penguatan	Masyarakat	-	Rp68.591.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASU UMUM (DAU)	ngan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah				

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	682.312.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	732.312.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	1 Unit	66.973.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembang	Masyarakat	-	76.973.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	unan kewilayahan				
	2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5550 Unit		5300 Unit	5400 Unit	366.143.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	376.143.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5500 Dokumen		6000 Unit	5200 Unit	150.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
							Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.276.000,00	Kab. Banjar, Gambut,	DANA ALOKASI UMU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	3. Penguatan infrastruktur	Masyarakat	-	29.276.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						Gambut	M (DAU)	ur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	pelayan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit		1 Unit	13 Unit	79.920.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	89.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.115.283.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas ,	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan	Masyarakat	-	1.145.283.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kewilayahan				
	2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Pengawasan dan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	699.992.000,00	Kab. Banjar, Semua	DANA ALOK	Melanjutkan pengembangan	3. Penguatan	Masyarakat	-	709.992.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASUM (DAU)	ngan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.06	14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	Rp10.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengemba	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															ngkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.06	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	6 Dokumen		4 Dokumen	6 Dokumen	395.291.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascaben	Masyarakat	-	405.291.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							pengadaan dan Pemasangan								lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	cana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	2	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	Rp10.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	Rp15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	85 Persen		75 Persen	77,5 Persen	Rp10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	Rp10.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
	2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	Rp10.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	3. Penguatan infrastruktur	Masyarakat	-	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Semua Kel/Desa	M (DAU)	ur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	pelayan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah				

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																peran aktif koperasi.					
		2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah angkutan umum yang tersedia dan beroperasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.062.500.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	2.072.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit		19 Unit	25 Unit	2.062.500.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas ,	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan	Masyarakat	-	2.072.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kewilayahan					
	2	15	2	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	Persentase Angkutan Umum dengan Tingkat Kinerja	100 Persen		83,33 Persen	83,33 Persen	36.529.600,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	3. Penguatan infrastruktur	Masyarakat	-	54.529.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan yang Baik						Semua Kel/Desa	M (DAU)	ur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17.521.600,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	25.521.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	2	2.14	3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
							Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kot	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	19.008.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembang	Masyarakat	-	29.008.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							a dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	unan kewilayah an				
3	2	15	3			PROGRAM PENGELOLAA	Persentase angkutan sungai dan danau	70,78 Persen		51,67 Persen	56,45 Persen	1.272.413.200,00						-	597.522.000 ,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							N PELAYARAN	dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik													
	2	15	3	2.03			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	30 Persen		10 Persen	15 Persen	37.541.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	37.541.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	3	2.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.185.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembang	Masyarakat	-	18.185.500,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	unan kewilayahan				
	2	15	3	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19.356.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	19.356.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	3	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	98 Persen		48 Persen	61 Persen	544.980.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayah	Masyarakat	-	559.980.500,00		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	3	2.13	2	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau															
							Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	539.457.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkat	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar	Masyarakat	-	549.457.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Kel/Desa	(DAU)	kan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	pascabencana dan pembangunan kewilayah an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau														
							Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	Rp5.523.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana dan pembangunan kewilayahan	Masyarakat	-	Rp10.523.500,00	DINAS PERHUBUNGAN

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Tar get	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	J U M L A H											14.022.979. 000,00							15.477.268. 358,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2027 merupakan agenda tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 dalam kerangka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2025-2029 serta prioritas pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Kabupaten Banjar 2027.

Adapun catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

1. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan adalah meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan untuk meningkatkan konektivitas darat.
2. Melakukan pendataan terhadap fasilitas perhubungan yang tersedia.

Selanjutnya dokumen Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mungkin dapat mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan terlebih dari seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

Martapura, 02 April 2026
**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar**



Dr. I. GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671210 199010 1 001